



**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2012-2016.**

SKRIPSI

**Oleh:
Laily Dwi Rahmawati
NIM 140810101137**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2012-2016.**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Laily Dwi Rahmawati
NIM 140810101137

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta ungkapan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hj. Kurniati Chusnah dan Ayahanda H. M. Supardi tercinta yang senantiasa mendoakan dalam setiap sujud panjangnya dan memberi dukungan yang tiada henti kepada ananda hingga saat ini, mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta ketulusan dan kasih sayang dan selalu menjadi motivator dan inspirator terbaik bagi penulis untuk meraih cita-cita dan kehidupan baik di masa depan.
2. Kakakku tersayang, Siti Aisyah Ika Yuniarti, Si yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam setiap perjalanan yang ditempuh penulis untuk mendapat ilmu yang bermanfaat.
3. Guru-guru dan para Dosen yang terhormat sejak Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya serta membimbing penulis dengan tulus dan penuh kesabaran.
4. Almamater kebanggaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Sebagai salah satu tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada mereka.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8).

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286).

“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit, dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi”

(Presiden RI, Joko Widodo).

“Sukses bukan tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi tentang seberapa besar kamu bisa membawa perubahan dan dampak baik untuk kehidupan orang lain”

(Michelle Obama).

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laily Dwi Rahmawati

NIM : 140810101137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2019

Yang menyatakan,

Laily Dwi Rahmawati

NIM 140810101137

SKRIPSI

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2012-2016.**

Oleh

Laily Dwi Rahmawati
NIM 140810101137

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor
Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-
2016.

Nama Mahasiswa : Laily Dwi Rahmawati

NIM : 140810101137

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

NIP. 196004121987021001

NIP. 197207131999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2012-2016.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Laily Dwi Rahmawati

NIM : 140810101137

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Nanik Istiyani, M.Si. (.....)
NIP. 196101221987022002
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindartin. M. Kes (.....)
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Aisiah Jumiati, S.E., M.P. (.....)
NIP. 196809261994032002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2016.

Laily Dwi Rahmawati

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa *time series* (tahun 2012-2016) dan *cross section* (38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur). Uji hipotesis menggunakan pengujian parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan koefisien determinasi (R^2). Uji asumsi menggunakan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan penelitian terdahulu. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode *Fixed Effect* dengan alat bantu *software* Eviews 7. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa PDRB, UMK dan Pendidikan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016 dengan tingkat kepercayaan 0,97%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara individu, hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, UMK dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016.

Kata kunci : Penyerapan tenaga Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto.

*The Analysis of Labor Absorption in the Processing Industry Sector in East
Java Province on 2012-2016 Period.*

Laily Dwi Rahmawati

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business,
University of Jember*

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of PDRB, regional/city minimum wages (UMK), and education on the absorption of labor in the processing industry sector in East Java Province on 2012-2016 period. This research is quantitative research which using panel data, the data using time series (2012-2016) and cross section data (38 districts/cities in East Java Province. The hypothesis test using partial test (t test), simultaneous test (f test) and determination coefficient (R^2). The classic assumption test are using multicollinearity test, heteroscedasticity test, and normality test. Types of data used in this research is secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) and the previous research. Methods of this research using the method of linear regression analysis with the method of panel data Fixed Effect used tools Eviews 7 software. The results of this research that PDRB, UMK, and education simultaneously has an effect to the absorption of labor in processing industry sector in East Java Province on 2012-2016 period with 0.97% significant level and the rest was influenced by others factors. Individually, the result of this research shows that PDRB, UMK and the education has significant effect to the absorption of labor in processing industry sector in East Java on 2012-2016 period.

Keywords: the absorption of labor, minimum wage (UMK), education, gross regional domestic product (PDRB).

RINGKASAN

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2016, Laily Dwi Rahmawati, 140810101137, 2019, Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya yang dilakukan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan perkembangan global. Salah satu bagian dari pembangunan yaitu pembangunan ekonomi (*economic development*) yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap pembangunan berikutnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses meningkatnya pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan kelembagaan (Arsyad, 2006:11).

Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu output dari kegiatan dalam mengelola hasil dari kegiatan ekonomi yang produknya berasal dari bahan baku atau penggalan seperti produk dari kegiatan produk lainnya yang perubahan pembaharuan atau rekonstruksi barang secara umum diperlakukan sebagai Industri pengolahan. Industri Pengolahan merupakan suatu pendorong bagi sektor lainnya dalam pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan nilai tambah atas harga berlaku sebesar Rp. 1.855,04 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 yaitu sebesar Rp. 1.405,24 triliun (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2016).

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertumbuhan domestik bruto yang menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian daerah tersebut (Todaro, 2011). Pembangunan ekonomi suatu negara dengan adanya tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita pada suatu wilayah rendah atau menurun apabila tingkat pertambahan PDBnya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya kegiatan produksi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Angkatan kerja akan mampu mempercepat keberlangsungan pembangunan nasional maupun pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengangguran yang tinggi mencerminkan bahwa wilayah tersebut tidak memiliki kemampuan daya beli masyarakat yang besar sehingga penyerapan

tenaga kerja masih belum bisa mengurangi jumlah pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam pertumbuhan ekonomi, untuk menggerakkan dan memacu pembangunan agar pendapatan masyarakat meningkat dengan adanya peningkatan output yang tersedia atau digunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan keadaan atau mekanisme pasar. Upah minimum Kabupaten/Kota merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemerintah, pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya.

Selain pembangunan pada bidang ekonomi, pembangunan pada bidang pendidikan tidak kalah penting karena pendidikan juga merupakan pilar pembangunan atau salah satu investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan dapat menguntungkan suatu daerah yang memiliki aset atau potensi pembangunan dikarenakan semakin tinggi pendidikan yang dicapai maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji atau upah yang sesuai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dan dengan metode analisis regresi linier data panel dengan alat bantu *software* Eviews 7. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil bahwa: 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja memiliki kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. 2) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan, maka semakin berkontribusi terhadap nilai atau angka pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur. 3) Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau rata lama sekolah, semakin tinggi pula kontribusinya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul *“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2016”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan banyak pihak maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dengan hati yang tulus dan penghargaan yang tinggi, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmatserta hidayah-Nya kepada penulis untuk kesehatan, keselamatan, kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si selaku dosen pembimbing I yang senantiasa bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala pengarahan, waktu dan kesabaran yang bapak berikan kepada saya;
3. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E, M.P selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, kritik dan saran yang membangun kepada saya. Terima kasih atas segala waktu dan arahan yang telah bapak berikan kepada saya;
4. Ibu Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik (dosen wali) yang telah membantu saya selama proses masa perkuliahan saya. Terima kasih telah memberi arahan kepada saya selama ini.;
5. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., terima kasih atas bimbingan dan doanya selama ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

9. Orangtua tercinta, Ibu Hj. Kurniati Chusnah dan Bapak H. M. Supardi yang tiada henti selalu mendoakan, memberi motivasi, semangat, kasih sayang, mendukung segala aktivitas saya serta pengorbanan selama ini;
10. Kakak tersayang, Siti Aisyah Ika Yuniarti, Si., dan Firmansyah. SH., yang telah memberikan motivasi, menginspirasi dan memberikan dukungannya selama ini;
11. Adik tersayang, Muhammad Alif Ardiansyah, yang selalu membangkitkan semangat selama ini;
12. Pak De Chusnul Arifin Damuri, Almh. Nurul Syamsiah Tri Arisandi dan keluarga yang telah menjadi inspirasi hidup saya;
13. Sahabat semasa kuliah yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan, Wanda Arum M, Rochmatul Mega H, Ma'ruf Hanuraga, Bagus Suryo N, Hendra Hadi, Candrasyah, Noffitria, M. Alwan Habibie, Vivit Puji A, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Paguyuban Gus dan Ning Jember 2017 dan staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang selalu memberi motivasi, semangat, dukungan dan menjadi teman terbaik sehingga terselesaikannya skripsi ini;
15. Teman-teman KKN UMD 36 tahun 2017 Desa Dawuhan, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Mas Bamby, Kapten Jekvien, Wisnu, Roni, Eka, Anne, Firdha, Euis, dan Risa. Terima kasih atas pengalaman dan keceriaan selama 45 hari;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember angkatan tahun 2014 dan seluruh teman-teman konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia atas kebersamaannya selama ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, inspirasi dan dukungan selama ini, dengan rendah hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Jember, 23 Januari 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMANTANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Konsep Industri.....	15
2.1.2 Teori Ekonomi Neoklasik Robert Solow.....	16
2.1.3 Tenaga Kerja.....	17
2.1.4 PDRB Sektor Industri Pengolahan	19
2.1.5 Konsep Upah.....	22
2.1.6 Pendidikan	24
2.2 Penelitian Empiris Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual	33

2.4 Research Gap	36
2.5 Hipotesis Penelitian	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sumber Data	37
3.3 Metode Analisis Data	37
3.3.1 Analisis Regresi Data Panel.....	37
3.3.2 Metode Estimasi Model Regresi Panel.....	38
3.3.3 Uji Spesifikasi Model	38
3.3.4 Uji Statistik	41
3.3.5 Pengujian Asumsi Klasik.....	43
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran	44
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	45
4.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Timur	45
4.1.2 Kondisi Administratif dan Demografi Provinsi Jawa Timur.....	46
4.1.3 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Timur	49
4.1.4 Kondisi Pendidikan Provinsi Jawa Timur	51
4.2 Gambaran Umum Variabel	52
4.2.1 Gambaran Umum Variabel Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur	52
4.2.2 Gambaran Umum Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur.....	54
4.2.3 Gambaran Umum Variabel UMK Provinsi Jawa Timur	56
4.2.4 Gambaran Umum Variabel Pendidikan Provinsi Jawa Timur.....	59
4.3 Hasil Analisis Data	62
4.3.1 Analisis Hasil Uji Chow dan Uji Hausman	62
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel: <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	63
4.3.3 Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness of Fit</i>)	65
4.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.4 Pembahasan	70
BAB 5. PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....75
LAMPIRAN.....78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun Dasar 2010	5
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Pulau Jawa	5
Tabel 1.3 Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2014-2016	7
Tabel 1.4 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Timur 2014-2016	8
Tabel 1.5 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016	9
Tabel 1.6 Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2016.....	10
Tabel 1.7 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa.....	11
Tabel 1.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2016.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, 2015, 2016.....	47
Tabel 4.2 Data Ketenagakerjaan Jawa Timur Tahun 2013.....	49
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016	53
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016	55
Tabel 4.5 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016	58
Tabel 4.6 Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman.....	63

Tabel 4.9 Hasil Analisis Data Panel menggunakan <i>Fixed Effect Model</i>	64
Tabel 4.10 Hasil Uji F Simultan	65
Tabel 4.11 Hasil Uji t-statistik	66
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).	67
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur	45
Gambar 4.2 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur Tahun 2011-2016	48
Gambar 4.3 Struktur Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016 dalam persen	50
Gambar 4.4 Diagram Buta Aksara di Jawa Timur	51
Gambar 4.5 Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 (Ribuan Rupiah)	57
Gambar 4.6 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Provinsi Jawa Timur	60
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	78
Lampiran B	85
Lampiran C	86
Lampiran D	87
Lampiran E.....	88
Lampiran F.....	89
Lampiran G	90
Lampiran H.....	91
Lampiran I.....	92
Lampiran J	93

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan disegala bidang kehidupan yang terjadi terus-menerus dan berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya yang dilakukan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan perkembangan global. Salah satu bagian dari pembangunan yaitu pembangunan ekonomi (*economic development*) yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap pembangunan berikutnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses meningkatnya pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan kelembagaan.

Tujuan dari proses pembangunan suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada bidang ekonomi, proses pembangunan ekonomi diharapkan mampu membawa peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi lebih maju dan bermutu. Suryana (2000:23), menjelaskan bahwa proses pembangunan ekonomi akan diikuti beberapa perubahan (*growth plus change*) diantaranya: pertama, perubahan struktur ekonomi yaitu perubahan yang terjadi dari sektor pertanian menuju sektor manufaktur termasuk industri. Perubahan struktur ekonomi ini dikarenakan perkembangan masa dan teknologi mengurangi peranan sektor pertanian. Kedua, perubahan kelembagaan melalui regulasi dan reformasi kelembagaan itu sendiri.

Transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah dari transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri atau dapat juga disebut perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menuju modern. Perubahan struktur yang terjadi dapat dilihat dari kontribusi sektor-sektor yang ada terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

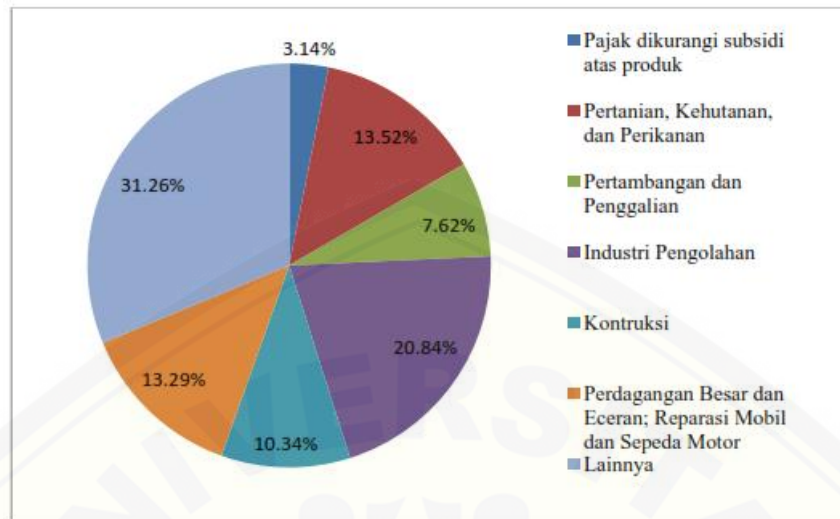
Peraturan Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai guna yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Industri Pengolahan adalah sektor yang mencakup seluruh perusahaan atau usaha dibidang industri yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan barang yang kurang memiliki nilai menjadi bernilai (Badan Pusat Statistik, 2017). Sektor Industri Pengolahan digolongkan berdasarkan kode klarifikasi industri yang universal yaitu

International Standard Industrial Classification of All Economy Activities (ISIC) yang telah disesuaikan oleh Indonesia menjadi Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Kategori Industri dan Pengolahan berdasarkan jenis komoditi utama yang dihasilkan oleh perusahaan dibagi menjadi sembilan sub sektor yaitu industri pupuk, barang kimia dan barang karet, industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kertas dan barang cetakan, industri kecil, industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, industri semen dan barang galian bukan logam, industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya, industri logam dasar besi dan baja, dan industri barang lainnya.

Perekonomian mengalami fluktuasi setiap tahun. Berdasarkan data *World Bank* pada tahun 1990-2016 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dunia selalu mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 4,45 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu -1,73 persen. Berdasarkan catatan perkembangan ekonomi, krisis ekonomi terjadi pada beberapa kurun waktu, tetapi pembahasan awal tertuju pada krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2009. Pada tahun kedua tersebut berdampak berbeda pada sektor industri di Indonesia. Krisis pertama terjadi pada tahun 1998 yang penyebab utamanya adalah krisis moneter dunia yang bermula di tahun 1997 yang menyebabkan tingkat inflasi negara di Indonesia mencapai 78 persen. Peningkatan inflasi tersebut memberikan dampak kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok dan tingkat pengangguran yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akibat dari PHK besar-besaran (Siregar & Wahyuniarti, 2007:25). Kondisi berbeda terjadi dalam krisis pada tahun 2009. Berdasarkan catatan krisis ini terjadi diakibatkan oleh kasus ketidakpercayaan sekuritas pada *subprime mortgage*. Namun, pada kejadian tahun 2009, ternyata tidak memberikan dampak fatal bagi Indonesia bahkan memberikan peningkatan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya (Bank Indonesia, 2009:43).

Struktur ekonomi Indonesia pada tahun 1990-an didominasi oleh sektor dibidang Pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia. Namun, seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian di Indonesia bergeser ke arah industrialisasi (Elias, 2010).

Gambar 1.1 Kontribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016.

Pada gambar 1.1, kondisi perekonomian Indonesia yang melambat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor Industri karena pertumbuhan sektor Industri justru masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan menyumbang sebesar 20,84 persen, kemudian disusul dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,52 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,12 persen. Hal tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia beralih dari negara agraris menjadi negara berbasis industri dengan ditunjukkan oleh kontribusi industri pengolahan selama kurun waktu 2012-2015 yang berada pada posisi puncak dengan presentase diatas 20 persen mengalahkan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Todaro dan Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen utama, yaitu: 1) akumulasi modal, 2) pertumbuhan penduduk, 3) kemajuan teknologi. Adanya akumulasi modal sangat membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan, peralatan fisik serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses pendidikan. Pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya angkatan kerja, tidak hanya berdampak positif terhadap penyediaan tenaga kerja yang produktif, tetapi juga memberikan dampak negatif dengan bertambahnya jumlah pengangguran apabila lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menampung banyaknya jumlah tenaga kerja tersebut. Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang.

Proses tahapan pembangunan ekonomi suatu negara sangat berhubungan erat dengan industrialisasi yang ada di negara tersebut. Proses pembangunan ekonomi dan pembangunan industri adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Disnakertrans, 2010). Menurut Simanjuntak (dalam jurnal Hadi, 2014) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Pembangunan di Indonesia sudah dikatakan berhasil oleh karena itu diharapkan mampu mendorong pembangunan di bidang lainnya (Lathifa, 2015).

Laju pertumbuhan ekonomi untuk skala nasional ditunjukkan oleh perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk skala regional ditunjukkan oleh perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan suatu proses berkembang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang cukup panjang dan didalamnya terdapat kemungkinan terjadinya penurunan dan kenaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung melambat. Kelambatan ini juga merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diikuti penurunan harga komoditas. Pada tahun 2015, perekonomian nasional mengalami perlambatan dan tumbuh hanya sebesar 4,79 persen. Angka tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN-P) tahun 2015 yaitu sebesar 5,7 persen (Bank Indonesia, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat bahwa Industri Pengolahan memberi kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 2016, kontribusi Industri Pengolahan mencapai angka 28,92 persen, mengalahkan sektor Pertanian yang hanya mencapai angka 13,31 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih besar ditopang oleh pertumbuhan Industri Non Migas dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan ini diharapkan dapat merata diberbagai wilayah di Jawa Timur, tidak hanya berfokus pada daerah-daerah kota karena sektor Industri Pengolahan sangat berpengaruh dalam setiap program pembangunan khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.

Masyarakat yang sejahtera dapat menjadikan masyarakat yang cerdas, maju dan mandiri. Ukuran dalam pertumbuhan ekonomi adalah dalam melakukan transformasi

ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier sehingga mengekspresikan sumber daya alam yang ada.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun Dasar 2010.

URAIAN	2013	2014	2015	2016
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)			
Jawa Timur	6.08	5.86	5.44	5.55
Nasional	5.78	5.02	4.88	5.02
Kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Nasional (%)	14.99	14.16	14.36	14.44

Sumber: Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I – 2017.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai 5,55 persen. Pencapaian tersebut adalah tertinggi setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Provinsi Jawa Timur lebih tinggi sebesar 0.53 poin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi terhadap nasional sebesar 14,44 persen.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertumbuhan domestik bruto yang menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian daerah tersebut (Todaro, 2011). Pembangunan ekonomi suatu negara dengan adanya tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita pada suatu wilayah rendah atau menurun apabila tingkat pertambahan PDBnya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Pulau Jawa.

Provinsi	2014	2015	2016
DKI Jakarta	1.762.316,40	1.989.329,54	2.177.119,88
Jawa Barat	1.385.825,08	1.524.832,20	1.652.589,44
Jawa Tengah	922.471,18	1.011.850,97	1.092.030,92
DIY	92842,48	101.447,65	110.098,34
Jawa Timur	1.537.947,63	1.692.903,00	1.855.042,70
Banten	428.740,07	478.543,97	516.326,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016.

Berdasarkan tabel 1.2, dalam Produk Domestik Regional Bruto provinsi Se-Jawa, Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebesar 1.537.947,63, kemudian mengalami peningkatan sebesar 1.692.903,00 di tahun 2015 dan sebesar 1.855.042,70 milyar pada tahun 2016.

Suatu pendapatan daerah didukung dengan adanya kegiatan produksi barang atau jasa bahwa sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan apabila tingkat investasi rendah akan diikuti terbatasnya kemampuan daerah untuk mengacu peningkatan produksinya, mendorong produk-produk unggulan agar mendapat nilai guna dan nilai strategis. Provinsi Jawa Timur banyak melakukan pengembangan pada kawasan industri dan keberagaman komoditas lainnya. Adanya dorongan dari PDRB dari berbagai sektor menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sektor Industri memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bahwa hampir semua negara mengembangkan sektor Industri guna meningkatkan daya saing terhadap negara lainnya. Industrialisasi memiliki peranan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan adanya kesempatan kerja (Kemenparin, 2012).

Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu output dari kegiatan dalam mengelola hasil dari kegiatan ekonomi yang produknya berasal dari bahan baku atau penggalan seperti produk dari kegiatan produk lainnya yang perubahan pembaharuan atau rekonstruksi barang secara umum diperlakukan sebagai Industri pengolahan. Industri Pengolahan merupakan suatu pendorong bagi sektor lainnya dalam pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan nilai tambah atas harga berlaku sebesar Rp. 1.855,04 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 yaitu sebesar Rp. 1.405,24 triliun (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2016).

Menurut Wicaksono (2010), Industri Pengolahan adalah industri yang strategis dimana industri dipandang dapat mendorong dan memajukan perekonomian Indonesia dengan adanya sumber daya manusia yang banyak, sektor Industri Pengolahan mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun pada kenyataannya Industri Pengolahan kurang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang menjadi prioritas dalam pembangunan khususnya dalam rangka mengurangi pengangguran. Masalah ketenagakerjaan dipengaruhi oleh penanaman modal, iklim investasi dan pasar global yang berakibat pada kemerosotan pertumbuhan industri. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Peningkatan tersebut tidak seiring dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih

banyak sehingga jumlah angkatan kerja yang ada tidak dapat ditampung seluruhnya dan berakibat pada penambahan jumlah pengangguran. Pertambahan jumlah penduduk yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kesempatan kerja menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang tidak mampu meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dari peningkatan jumlah penduduk.

Tenaga kerja ahli berbeda dengan tenaga kerja biasa. Tenaga ahli dinilai berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang lebih banyak bekerja dengan ilmu pengetahuan, konsep dan pemikiran. Pada sebuah proses produksi tidak hanya mempekerjakan tenaga ahli saja namun juga mempekerjakan tenaga kerja biasa seperti pekerja tetap dalam sebuah perusahaan.

Suatu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh persediaan modal, kemajuan pada bidang teknologi dan pertumbuhan jumlah pekerja, dimana sumber daya manusia mampu untuk mengembangkan teknologi baru. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk sebesar 39,293 juta jiwa pada tahun 2017 yang terdiri dari penduduk laki-laki 19,4 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 19,9 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017). Tenaga kerja merupakan suatu aspek ekonomi yang membutuhkan pengawasan, pengelolaan serta pengendalian yang didukung oleh kebijakan-kebijakan. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah ketimpangan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan kerja. Semakin meningkatnya kegiatan produksi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Angkatan kerja akan mampu mempercepat keberlangsungan pembangunan nasional maupun pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengangguran yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan bahwa wilayah tersebut tidak memiliki kemampuan daya beli masyarakat yang besar sehingga penyerapan tenaga kerja masih belum bisa mengurangi jumlah pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja baru.

Tabel 1.3 Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2014-2016.

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)		Jumlah	Kesempatan Kerja (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Bekerja	Pengangguran			
2014	19.306.508	843.47	20.149.978	0,96%	5,86%
2015	19.367.777	906.904	20.274.681	0,96%	5,44%
2016	19.114.563	839.283	19.953.846	0,96%	5,57%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2016 jumlah angkatan kerja yang bekerja dan menganggur mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Jumlah penduduk bekerja dan menganggur terbesar terjadi pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 angkatan kerja mengalami penurunan, tetapi jumlah pengangguran masih terbilang cukup tinggi karena kesempatan kerja yang tersedia di Provinsi Jawa timur masih sangat kecil. Masalah ketenagakerjaan menjadi prioritas utama sebagai target pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Teori pertumbuhan Neoklasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi termasuk faktor tenaga kerja. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai 5,57 persen, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,02 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2016 tersebut disebabkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, pengeluaran pemerintah, peningkatan pada investasi hingga ekspor-impor. Namun, pada tahun tersebut angka kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur hanya sebesar 0,96 persen yang berarti pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga angka pengangguran masih cukup besar. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa timur di tahun 2016 yaitu pada sektor Industri Pengolahan yang telah berkontribusi 29 persen, Perdagangan 19 persen, dan Pertanian 13 persen. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti peningkatan output pada beberapa sektor ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada tiap-tiap sektor usaha.

Tabel 1.4 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016.

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja (jiwa)		
	2014	2015	2016
1. Pertanian	7.261.367	7.083.252	7.975.568
2. Pertambangan dan Penggalian	143.338	125.813	135.184
3. Industri Pengolahan	3.133.049	3.151.221	3.163.511
4. Listrik, gas dan air	35.849	29.217	32.53
5. Bangunan	1.259.443	1.510.085	1.469.473
6. Perdagangan, hotel dan restoran	4.026.671	4.121.312	4.016.808
7. Angkutan	686.972	636.15	697.714
8. Keuangan	421.788	410.912	422.899
9. Jasa Kemasyarakatan	2.694.528	2.751.360	2.599.099
Jumlah	19.663.005	19.819.322	20.512.786

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan penduduk yang bekerja dan masing-masing sektor ekonomi mengalami peningkatan dan penurunan tenaga kerja. Pada tahun 2015, sektor Industri Pengolahan, Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa Kemasyarakatan mengalami peningkatan tenaga kerja. Pada tahun 2016, sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Angkutan serta Keuangan mengalami peningkatan tenaga kerja. Sektor Pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran kemudian disusul oleh sektor Industri Pengolahan. Selama tahun 2014 sampai tahun 2016 sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan tenaga kerja meskipun jumlah tenaga kerja yang terserap masih lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor Pertanian.

Peranan sektor Industri Pengolahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari adanya peranan investasi. Investasi tersebut dapat berupa investasi asing maupun investasi domestik.

Tabel 1.5 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016.

Tahun	Nilai Produksi (milyar rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Pertumbuhan (%)
2011	62.933	5,2	200.287	5,4
2012	63.856	1,5	203.287	1,5
2013	66.836	4,7	211.159	3,9
2014	67.271	0,7	212.832	0,8
2015	67.702	0,6	214.057	0,6
2016	67.993	0,4	215.149	0,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jawa Timur Dalam Angka 2017.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa nilai investasi sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, namun pertumbuhan investasi cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2011, investasi mengalami pertumbuhan investasi hanya mencapai angka 0,4 persen. Menurunnya pertumbuhan investasi pada sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur tidak berarti pembangunan ekonomi mengalami kemunduran, begitu pula sebaliknya karena bukan besarnya pertumbuhan investasi melainkan bagaimana efisiensi atau

produktivitas dari investasi tersebut. Penyerapan tenaga kerja yang besar membutuhkan investasi yang besar pula dan diarahkan ke sektor yang banyak pula menyerap tenaga kerja.

Tabel 1.6 Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2016.

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Bekerja/TPAK
DKI Jakarta	4.054.976	504.132	4.559.108	88.94
Jawa Barat	16.164.835	2.262.407	18.427.242	87.72
Jawa Tengah	16.106.028	1.234.645	17.340.673	92.88
DIY	1.863.747	119.785	1.983.532	93.96
Jawa Timur	18.861.360	1.255.885	20.117.245	93.76
Banten	3.652.525	601.836	4.254.361	85.85

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017.

Berdasarkan tabel 1.6, Pulau Jawa memiliki pertumbuhan penduduk terbanyak dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Pada tahun 2016, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang bekerja paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu sebesar 18.861.360 penduduk, pengangguran 1.255.885 jiwa dari jumlah angkatan kerja 20.117.245 jiwa yang juga merupakan jumlah angkatan kerja terbanyak se-Pulau Jawa.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur mengalami fluktuasi berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2016, dimana pada tahun 2011 TPAK Jawa Timur adalah sebesar 68,04 persen dari total TPAK, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 69,57 persen, pada tahun 2013 sebesar 69,78 persen, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 68,12 persen dan 67,84 persen di tahun 2015 dari masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha kebijakan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu daerah dan sering diukur dengan tinggi atau rendahnya pendapatan riil. Dalam pertumbuhan ekonomi, untuk menggerakkan dan memacu pembangunan agar pendapatan masyarakat meningkat dengan adanya peningkatan output yang tersedia atau digunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan keadaan atau mekanisme pasar. Upah minimum Kabupaten/Kota merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemerintah, pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya.

Tabel 1.7 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa.

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	1.118.000	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.000	2.700.000
Jawa Barat	671.500	732.000	780.000	850.000	1.000.000	1.000.000
Jawa Tengah	660.000	675.000	765.000	830.000	910.000	910.000
DIY	754.694	808.000	892.660	947.144	988500	988.500
Jawa Timur	630.000	705.000	745.000	866.250	1.000.000	1.000.000
Banten	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016.

Berdasarkan data BPS tahun 2016, menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya (2010-2015). Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Provinsi yang upah minimumnya tertinggi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 2.700.000 rupiah, tertinggi kedua adalah Provinsi Banten sebesar 1.600.000 rupiah, kemudian Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat mengalami peningkatan selama tahun 2010-2014, namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami stagnan yaitu sebesar 1.000.000 rupiah, sedangkan Provinsi yang memiliki upah minimum terendah adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu 988.500 rupiah.

Selain pembangunan pada bidang ekonomi, pembangunan pada bidang pendidikan tidak kalah penting karena pendidikan juga merupakan salah satu investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat menguntungkan suatu daerah yang memiliki aset atau potensi pembangunan dikarenakan semakin tinggi pendidikan yang dicapai maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji atau upah yang sesuai.

Pada tahun 2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan secara signifikan. Partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih kurang. Berdasarkan data, APS dalam program pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah berhasil dicapai oleh beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang dan Kota Batu. Rata-rata APS Jawa Timur tahun

2013 pada usia 7-12 tahun adalah sebesar 99,06 persen dan pada usia 13-15 tahun sebesar 92,87 persen.

Di Jawa Timur banyak lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK memilih untuk bekerja daripada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan pendidikan telah dilakukan seperti pembangunan sarana dan prasarana serta program beasiswa pendidikan.

Tabel 1.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2016.

Provinsi	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK
DKI Jakarta	97.64	80.72	59.54
Jawa Barat	98.05	90.29	57.22
Jawa Tengah	97.13	79.13	59.2
DIY	99.29	83.25	69.66
Jawa Timur	97.77	81.52	61.49
Banten	97.56	80.59	57.88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan data tersebut, tingkat partisipasi sekolah untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi di Jawa Timur masih tergolong menengah, hal ini dapat diketahui melalui tabel diatas bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Jawa Timur tingkat SD/MI tahun 2016 sebesar 97.77 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 81.52 persen dan tingkat SMA/SMK sebesar 61.49 persen.

Berdasarkan uraian diatas menjadi alasan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2016.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penerapan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur?.
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur?.

3. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur?.
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pendidikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penerlitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur 2012-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pendidikan secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi valid mengenai tema yang peneliti angkat. Penelitian ini juga secara umum diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama mendalami perkuliahan di Universitas Jember ke lapangan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah didapat selama

perkuliahan di Universitas Jember ke lapangan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi, dasar acuan maupun bahan pertimbangan yang valid yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan baru dan sebagai referensi atau bahan rujukan di dunia pendidikan untuk penelitian berikutnya.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku langsung dilapangan sudah pasti membutuhkan informasi, khususnya adalah mengenai bidang industri didaerahnya. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi dan potensi serta strategi pengembangan sektor Industri Pengolahan khususnya. Lebih jauh lagi adalah masyarakat mampu memanfaatkan potensi pada bidang atau sektor industri didaerahnya untuk memajukan ekonomi baik secara pribadi maupun untuk daerahnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Industri

Menurut Undang-Undang no. 5 Tahun 1984 yang telah direvisi dengan Undang-Undang no. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau barang yang kurang memiliki nilai manfaat atau nilai jualnya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat dengan pemakaian akhir.

Menurut Badan Pusat Statistik, perusahaan Industri Pengolahan dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, yakni:

1. Industri Besar, perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih.
2. Industri Sedang, perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sebanyak 20 sampai 99 orang.
3. Industri Kecil, perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5 sampai 19 orang.
4. Industri Rumah Tangga, perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sebanyak 1 sampai 4 orang saja.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan nilai investasi dan legalitas usaha, yaitu:

1. Industri Formal, memiliki legalitas usaha Ijin Usaha Industri (IUI) dengan investasi lebih dari 200.000.000 rupiah sampai dengan 10.000.000.000 rupiah untuk jenis industri sedang dan lebih dari 10.000.000.000 untuk jenis industri besar.
2. Industri Non Formal, perusahaan industri dengan investasi sebesar 5.000.000 rupiah kebawah dan tidak memiliki legalitas usaha.
3. Industri Informal, memiliki legalitas usaha Tanda Daftar Industri (TDI) dengan investasi lebih dari 5.000.000 rupiah sampai dengan 200.000.000 rupiah.

2.1.2 Teori Ekonomi Neoklasik Robert Solow

Teori Neoklasik Robert Solow dari *Massachusetts Institute of Technology* dan *Trevor Swan* dari *The Australian National University*. Teori ini berkembang sejak tahun 1950 dan berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bergantung pada faktor produksi yang berupa kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan, penanaman modal melalui tabungan dan investasi serta penyempurnaan dibidang teknologi. Model pertumbuhan ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemampuan teknologi berinteraksi dalam suatu negara secara menyeluruh. Pertumbuhan suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2010:214).

Model Solow Swan menyatakan bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan *steady-state* yang bergantung pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Asumsi-asumsi dalam model ini di antaranya adalah (Jhingan, 1990:334):

1. Ada satu komoditas yang diproduksi.
2. Output adalah berupa *output neto* setelah dikurangi penyusutan modal.
3. *Return to scale* konstan sehingga fungsi produksi adalah bersifat homogen.
4. Buruh dan modal dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal.
5. Harga dan upah fleksibel.
6. Tenaga kerja dan stok modal digunakan secara penuh.
7. Kemajuan teknologi bersifat netral.

Model Neoklasik Solow Swan menggunakan suatu fungsi produksi dimana modal dan tenaga kerja memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bentuk fungsi produksi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Q = f(K, L)$$

Keterangan:

Q = Jumlah output yang dihasilkan

C = Capital (modal sebagai input)

L = Labour (tenaga kerja sebagai input).

Teori Robert Solow ini menggunakan model yang memungkinkan adanya substitusi antara kapita dan tenaga kerja. Robert Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi

merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi dan hasil input ataupun hasil output. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif, oleh karena itu menurut Robert Solow, penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Jhingan (1994), menyatakan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya adalah sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi serta pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan faktor non ekonomi adalah faktor manusia dan faktor sosial. Hal ini dapat diketahui macam-macam faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

2.1.3 Tenaga Kerja

Dalam menentukan sebuah keberhasilan pembangunan salah satu faktornya adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja dan seluruh penduduk di Indonesia pada umumnya. Istilah tenaga kerja (*man power*) dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang tergolong angkatan kerja atau penduduk dalam usia produktif (usia kerja) atau telah memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja dan yang mencari suatu pekerjaan. Sedangkan yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia produktif (usia kerja) yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari suatu pekerjaan (Dumairy, 1996).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan produksi, dimana kegiatan produksi memerlukan faktor produksi di antaranya tenaga kerja (Tanti, 2016). Tenaga kerja merupakan penduduk yang telah masuk dalam usia kerja. Penduduk yang masuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang usianya di atas 16 tahun. Secara garis besar tenaga kerja di bagi menjadi 2 golongan yaitu: Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Pitana dan Diarta, 2009). kelompok angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah: mereka yang sebelum pencacahan melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan minimal satu jam, mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan atau bekerja kurang dari dua hari (Nopirin, 2008).

(Rochmani, 2016) Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari, berusaha atau mengharap pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan yang dimaksud bukan kelompok angkatan kerja adalah kelompok

penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja (Nopirin, 2008). Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja dan bisa juga lebih besar permintaan dibandingkan penawaran (Mulyadi, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Penduduk usia kerja yaitu penduduk berumur 15 tahun keatas.
2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara bekerja dan pengangguran.
3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu lalu. Kegiatan tersebut adalah pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
5. Memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara bekerja karena berbagai faktor, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya.
6. Pengangguran terbuka.
7. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) proporsi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang terlibat aktif dipasar tenaga kerja, baik yang bekerja mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

Menurut Adam Smith, titik permulaan suatu pertumbuhan yaitu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja dengan asumsi (1) meningkatnya keterampilan kerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan mesin yang dapat menghemat tenaga. Adanya teknologi yang dapat memperluas pasar sehingga dapat membantu pertukaran barang produksi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor produksi yang berupa

penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal (investasi). Model pertumbuhan neoklasik, model dasar dalam model pertumbuhan ini adalah:

$$Y = f(K, L)$$

Dimana:

Y = Output

K = Kapital/modal fisik, modal pekerja

L = Angkatan Kerja

Dalam teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan output terjadi dari beberapa faktor yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan, penambahan modal melalui tabungan dan investasi serta pengembangan dan penyempurnaan dibidang teknologi.

Tenaga kerja menurut Undang-Undang no.13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Subri (2003:81) tenaga kerja yang diserap dalam pasar kerja terdapat tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik, Tenaga Ahli atau Tenaga Mahir

Adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran yang didapatkan dari menempuh suatu pendidikan formal (tingkat Sekolah Dasar hingga Sarjana) maupun pendidikan Informal (kursus).

2. Tenaga Kerja Terlatih

Adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian yang didapatkan dari pengalaman bekerja. Untuk menjadi tenaga kerja terlatih tidak diperlukan kualifikasi pendidikan tertentu, melainkan hanya diperlukan adanya latihan yang berulang dan terus menerus sehingga memiliki dan menguasai keahlian tersebut.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Adalah tenaga kerja yang memiliki pekerjaan tanpa perlu memiliki pendidikan dan pengalaman bekerja, melainkan hanya mengandalkan tenaga saja.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah pendapatan, pengurangan ketimpangan, berkurangnya angka kemiskinan,

jumlah penduduk yang bekerja dan adanya suatu nilai tambah dari suatu kegiatan perekonomian wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi harus diimbangi pula dengan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil secara merata. Menilai pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari pendapatan nasional riil yaitu dengan melihat Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dalam tahun dasar.

Penghitungan produk domestik lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disebut domestik karena menyangkut batas wilayah dan disebut bruto karena telah memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode atau untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2013). PDRB juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang di produksi oleh suatu daerah (regional) dalam periode waktu tertentu serta ditambah pula oleh hasil produksi barang dan jasa yang berbeda pada konsumen tingkat akhir. Semakin tinggi PDRB pada suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. PDRB terdiri dari dua jenis (Badan Pusat Statistik, 2010) yaitu:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang sedang berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan pada sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi di suatu daerah.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu untuk menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Konstan fungsinya adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor harga.

Menurut Badan Pusat Statistik, perhitungan PDRB secara konseptual terdapat tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya adalah satu tahun). Menurut pendekatan produksi, nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahunnya terdiri dari beberapa sektor atau lapangan usaha, yaitu: 1) Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Komunikasi, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15) Jasa Pendidikan, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17) Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran.

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori serta ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan.

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai macam faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut berupa bunga modal, upah atau gaji, sewa tanah, dan keuntungan dan semuanya belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. PDRB mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa timur, PDRB Atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul pada seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Sektor Industri Pengolahan terdapat bahan baku dari produk Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan atau Penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Industri Pengolahan dibagi terdapat beberapa jenis subkategori, yaitu: 1) Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi, 2) Industri Makanan dan Minuman, 3) Industri Pengolahan Tembakau, 4) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, 5) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, 6) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman, 7) Industri Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekam, 8) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, 9) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, 10) Industri Barang Galian Bukan Logam, 11) Industri Logam Dasar, 12) Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik, 13) Industri Mesin dan Perlengkapan, 14) Industri Alat Angkutan, 15) Industri Furnitur, 16) Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

2.1.5 Konsep Upah

Upah dapat dikatakan sebagai salah satu alat motivator untuk meningkatkan produktivitas kerja karena upah adalah sebagai imbalan yang diterima seseorang setelah melakukan pekerjaan yang berupa uang atau barang melalui pernjjian kerja atas jasanya untuk memenuhi kebutuhannya.. Makun tinggi upah yang diterima seseorang akan membuat karyawan atau pegawai dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas kerjanya. Upah merupakan pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sadono Sukirno, 2016: 350).

Dalam pemberian suatu upah atau balas jasa ini dimaksudkan untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga dan membangkitkan semangat kerja karyawan dan agar selalu menjaga kelangsungan hidup sebuah karyawan di suatu perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya, upah yang diterima oleh pekerja dibedakan menjadi dua jenis yaitu Upah Nominal dan Upah Riil. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin, sedangkan Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja apabila ditukarkan dengan barang dan jasa yang didapat dari pertukaran uang tersebut.

Terdapat beberapa teori yang melatarbelakangi terbentuknya harga upah tenaga kerja, diantaranya:

1. Teori Upah Wajar

Teori ini disampaikan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sendiri maupun keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika upah yang diberikan terlalu tinggi maka akan memengaruhi harga barang dan jumlah penjualan (sesuai dengan prinsip ekonomi). Apabila upah yang diberikan rendah maka pekerja akan hidup kekurangan, tidak berkecukupan dan tidak layak (tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan).

2. Teori Upah Besi

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassale. Menurut Lassale, penerapan pada system upah sudah pasti akan menimbulkan tekanan terhadap buruh karena kaum buruh berada pada posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh produsen. Lassale menyarankan untuk menghadapi kebijakan produsen terhadap upah dengan membentuk serikat pekerja.

3. Teori Upah Etika

Upah yang diberikan kepada para pekerja seharusnya sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja sehingga para pekerja dapat hidup layak.

4. Teori Malthus

Menurutnya, jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang dipakai untuk menjelaskan berbagai hal. Ia berpendapat bahwa apabila penduduk bertambah, penawaran kerja juga akan bertambah sehingga dapat menekan tingkat upah. Demikian pula sebaliknya, tingkat upah akan meningkat apabila penawaran kerja berkurang apabila jumlah penduduknya menurun.

Upah dan pembentukan harga upah dikemukakan oleh beberapa teori, salah satunya adalah teori David Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa perbaikan tenaga kerja dan pembentukan upah sebaiknya diserahkan kepada persaingan bebas di pasar. Ricardo berpendapat bahwa upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kehidupan diri sendiri maupun keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika upah yang diberikan oleh perusahaan terlalu tinggi, sesuai dengan prinsip ekonomi maka akan berpengaruh pada harga barang dan jumlah penjualan. Harga akan meningkat seiring dengan biaya produksi yang tinggi. Apabila upah yang diberikan terlalu rendah, pekerja akan hidup tidak layak. Untuk mengetahui seberapa besar upah yang layak diterima pekerja dan buruh maka akan mengikuti dengan hukum permintaan dan penawaran.

Menurut Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum merupakan suatu standart minimum yang dilakukan oleh pengusaha atau pelaku bisnis untuk memberikan upah kepada para pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum atau terendah yang berhak didapat oleh pekerja sebagai imbalan dari pengusaha atau pelaku bisnis kepada para karyawan atau pekerjanya untuk suatu jasa yang telah dilakukan oleh pekerjanya dalam bentuk uang yang ditetapkan atau dasar suatu perjanjian kerja dengan tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Dengan demikian, penetapan upah minimum bertujuan untuk penghasilan pekerja supaya tidak lebih dari suatu tingkat tertentu (Sumarsono, 2003:47).

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan suatu kebijakan tentang upah yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjamin kesejahteraan para pekerja atau buruh di Jawa Timur. Kebijakan ini menguntungkan bagi pekerja atau buruh di Jawa Timur karena Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan terus

meningkat mengikuti tingkat Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga secara tidak langsung, adanya penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur dapat menjamin kesejahteraan para pekerja dan buruh, selain itu pemerintah juga dapat memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, maupun subsektoral (Sumarsono dalam Ninda N, 2002) dan upah tersebut bukan termasuk dalam tunjangan namun hanya batasan upah paling rendah yang ditetapkan terhadap pekerjanya.

2.1.6 Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi teladan, membangun kemauan (hasrat, nilai) dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Suryadi, 1994). Apabila setiap orang memiliki penghasilan lebih tinggi karena pendidikannya juga lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dapat ditunjang. Pendidikan merupakan salah satu modal manusia dalam mengembangkan kreatifitasnya dan menambah ilmu bagi dirinya sehingga output yang diperoleh (keahliannya) mampu memberikan wawasan yang lebih luas. Suatu pendidikan di Indonesia terdapat jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan dapat memberi *multiplayer effect* terhadap pembangunan suatu negara termasuk pembangunan di sektor ekonomi (Khusaini, 2007). Pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena dapat menambah nilai baik bahwa dari investasi pendidikan dapat mengubah cara pandang atau pola pikir seseorang. Melalui

pendidikan, seseorang dapat menambah pengetahuan sehingga dapat bersosialisasi dengan baik. Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Pendidikan Formal, kegiatan bertingkat atau berjenjang mulai dari Sekolah Dasar (SD/MI) sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan Non Formal, kegiatan yang terorganisir dan sistematis diluar sekolah yang dilakukan secara mandiri.
3. Pendidikan Informal, suatu proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang mendapatkan nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman hidup sehari-hari.

Pendidikan merupakan masukan atau input bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*) dimana pendidikan menjadi investasi yang produktif dalam Sumber Daya Manusia (Todaro, 2009:60).

Berdasarkan pada data yang tersedia pada Badan Pusat Statistik tahun 2013, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years School (MYS) merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu daerah. Dalam menghitung Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diperlukan informasi partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki dan tingkat atau kelas tertinggi yang pernah atau sedang diduduki. Tingkat pendidikan tertinggi merupakan presentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah sesuai dengan pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Penduduk yang telah menyelesaikan atau tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dihitung lama sekolahnya adalah enam tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dihitung lama sekolahnya selama Sembilan tahun, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dihitung lama sekolahnya adalah selama 12 tahun (tidak termasuk yang mengulang).

Hal yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian tenaga kerja terutama melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja disuatu daerah. Upaya dalam pembangunan pada bidang pendidikan, tingkat penduduk yang tamatan SMA/SMK masih lebih banyak jika dibandingkan dengan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diketahui bahwa kurang maksimalnya penyerapan angkatan kerja penduduk yang lulusan minimal SMA/SMK.

2.1 Penelitian Empiris Terdahulu

Moch Arifin (2010), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah 1986-2008 dan mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel Investasi dan Tenaga Kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986-2008 dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Made Ika Prastya Dewi (2014), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran di Provinsi Bali. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PDRB, penduduk usia kerja dan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Hotel dan Restoran di Provinsi Bali, sedangkan variabel pengangguran terdidik tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Hotel dan Restoran di Provinsi Bali.

I Made Tony Irawan (2014), meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB per kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali.” Dengan hasil penelitian bahwa variabel Pendidikan, PDRB perkapita dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Namun secara parsial, variabel Pendidikan dan PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali, sedangkan variabel tingkat pengangguran memiliki positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2007-2013.

Ahmad Mujahidul Furqon (2014), melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik tahun 1998-2012 dan mendapatkan hasil bahwa PDRB dan jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Kabupaten Gresik selama periode tahun 1998-2012.

Yuniarto Fajar Nugroho, Achmad Qosjim dan Anjar Widjadjanti (2015), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur 2011-2015”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan bersifat inelastis. Pada tahun 2005-2006 bersifat elastis, sedangkan pada tahun lainnya bersifat inelastis. Kontribusi sektor Industri Pengolahan Jawa

Timur terhadap PDRB Jawa Timur tertinggi pada tahun 2007 dan terendah terjadi pada tahun 2011.

Bagas Frendy Nata (2015), meneliti tentang pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), jumlah unit, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa UMK, jumlah unit, investasi dan pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri di Banyuwangi.

Dewi Maharani (2016), dengan judul penelitiannya “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara” menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien Investasi Domestik, Investasi Asing dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara.

Zainuddin Iburrasyad (2016), meneliti tentang “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014” dan mendapat hasil penelitian bahwa variabel Investasi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY, sedangkan variabel tenaga kerja dan jumlah penduduk.

Binar Dwiyanto Pamungkas, Kurniawansyah, dan Razi Apriansyah Mustaram (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2016” telah memperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil Uji t, variabel investasi dan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa, sedangkan berdasarkan hasil Uji f, variabel investasi dan variabel tenaga kerja secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2016.

M. Nur Arianto Al Arif (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia”. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin lama penduduk disuatu provinsi bersekolah, maka semakin tinggi tingkat pendidikan disuatu provinsi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut yang diprosikan dengan pendapatan regional bruto. Namun tingkat melek huruf yang tertinggi ternyata tidak memiliki pengaruh, hal ini menunjukkan bahwa tingkat melek huruf tinggi namun kemampuan dasar membaca tidak memiliki dampak pada peningkatan produktivitas penduduk di provinsi tersebut.

Penelitian Rudi Hartono (2018), dengan judul penelitiannya “Dinamika Konsentrasi Industri Pengolahan di Jawa Timur Tahun 2012-2015 menunjukkan hasil bahwa konsentrasi pada sektor Industri Pengolahan di 20 Kabupaten/Kota kawasan peruntukan industri Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 ditemukan 50 persen dari rasio konsentrasi keseluruhan dikuasai oleh lima Kabupaten/Kota yaitu Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik. Hasil analisis pengaruh tingkat konsentrasi bahwa faktor analisis produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif.

Erfatul Hasanah (2018), dengan judul penelitiannya “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2016” menunjukkan hasil bahwa Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai produksi Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2016 namun berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur 2000-2016. Nilai produksi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan Jawa Timur dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan Jawa Timur 2000-2016.

Karlina Kusumasari (2018) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri Pengolahan Digermakertosusila Plus” dan mendapatkan hasil bahwa investasi, PDRB, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di tujuh Kabupaten/Kota Digermakertosusila Plus.

Ma'ruf Hanuraga (2018), meneliti tentang pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Kontruksi di Indonesia dengan studi enam Provinsi yang ada di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur) bahwa pergerakan dinamika ketenagakerjaan di enam Provinsi tersebut menunjukkan tren peningkatan disetiap tahunnya (2006-2015).

Penelitian Rahmawati (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pendidikan, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur Periode 2011-2016” menunjukkan hasil pendidikan dan tenaga kerja memiliki koefisien positif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur 2011-2016, namun hasil regresi variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur tahun 2011-2016 menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Analisis	Hasil Analisis
1	Moch Arifin (2010).	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah 1986-2008.	Analisis Regresi Data Panel.	Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Investasi dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah 1986-2008.
2	Made Ika Prastya Dewi (2014).	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran di Provinsi Bali.	Analisis Data Panel dengan pendekatan <i>fixed effect</i> .	Variabel PDRB, penduduk usia kerja, dan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Perdagangan Hotel dan Restoran di Provinsi Bali. sedangkan variabel pengangguran terdidik tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Perdagangan Hotel dan Restoran di Provinsi Bali.
3	I Made Tony Irawan (2014).	Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per kapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali.	Regresi Linier Berganda.	Penelitian ini telah mendapatkan hasil bahwa variabel pendidikan dan PDRB per kapita secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013.
4	Ahmad Mujahidul Furqon (2014).	Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Analisis Regresi Linear Berganda	PDRB dan jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel upah minimum dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di

		pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik tahun 1998-2012.		Kabupaten Greik tahun 1998-2012.
5	Yuniarto Fajar Nugroho, Achmad Qosjim dan Anjar Widjadjanti (2015).	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.	Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja dan Proporsi.	Elastisitas penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan bersifat inelastis. Tahun 2005-2006 bersifat elastis, sedangkan pada tahun yang lain bersifat inelastis. Kontribusi sektor industri pengolahan provinsi Jawa Timur terhadap PDRB provinsi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2007 dan terendah pada tahun 2011.
6	Bagas Frendy Nata (2015).	Pengaruh UMK, Jumlah Unit, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi.	Analisis Regresi Linear Berganda.	Upah Minimum Kabupaten/Kota, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Banyuwangi.
7	Dewi Maharani (2016).	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara.	Regresi Linier Berganda.	Penelitian ini telah membuktikan bahwa investasi domestik, investasi asing dan tenaga kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara.
8	Zainuddin Ibnurrasyad (2016).	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran	Analisis Regresi Data Panel.	Variabel investasi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel tenaga

		Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014.		kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY, dan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY.
9	Binar Dwiyanto Pamungkas, Kurniawansyah, Razi Apriansyah Mustaram. (2017).	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2016.	Analisis Regresi Data Panel.	Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB Sumbawa, sedangkan berdasarkan uji F, investasi dan tenaga kerja secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa.
10	M. Nur Rianto Al Arif (2017).	Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia.	Regresi Linier Berganda.	Penelitian ini telah membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan disuatu provinsi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan pendapatan regional bruto.
11	Rudi Hartono (2018).	Dinamika Konsentrasi Industri Pengolahan di Jawa Timur Tahun 2012-2015.	Analisis Shift Share.	Pengaruh terhadap tingkat konsentrasi didapatkan bahwa faktor analisis berupa produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh negatif karena jumlah tenaga kerja yang banyak menyebabkan sektor subsisten dapat tetap mempertahankan tenaga kerja mereka dan jika dapat bertahan maka unit usaha akan semakin meningkat sehingga menurunkan konsentrasi.
12	Erfatul Hasanah (2018).	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri	Analisis Jalur (<i>path analysis</i>).	Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai produksi industri pengolahan Jawa Timur 2000-2016,

Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2016.

namun investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan Jawa Timur. Nilai produksi dan UMP berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Timur tahun 2000-2016.

13	Karlina Kusumasari (2018).	Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Digermakertosusila Plus.	Analisis Regresi Data Panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Germakertosusila Plus.
14	Ma'ruf Hanuraga (2018).	Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia (studi: 6 Provinsi di Jawa).	Analisis Regresi Data Panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan dinamika ketenagakerjaan pada ke enam provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur) menunjukkan tren peningkatan disetiap tahunnya (2006-2015).
15	Rahmawati (2018).	Analisis Pendidikan, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur Periode 2011-2016.	Analisis Regresi Data Panel.	Pendidikan memiliki koefisien positif tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan Jawa Timur. Tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB industri pengolahan Jawa Timur dan UMK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Timur 2011-2016.

2.3 Kerangka Konseptual

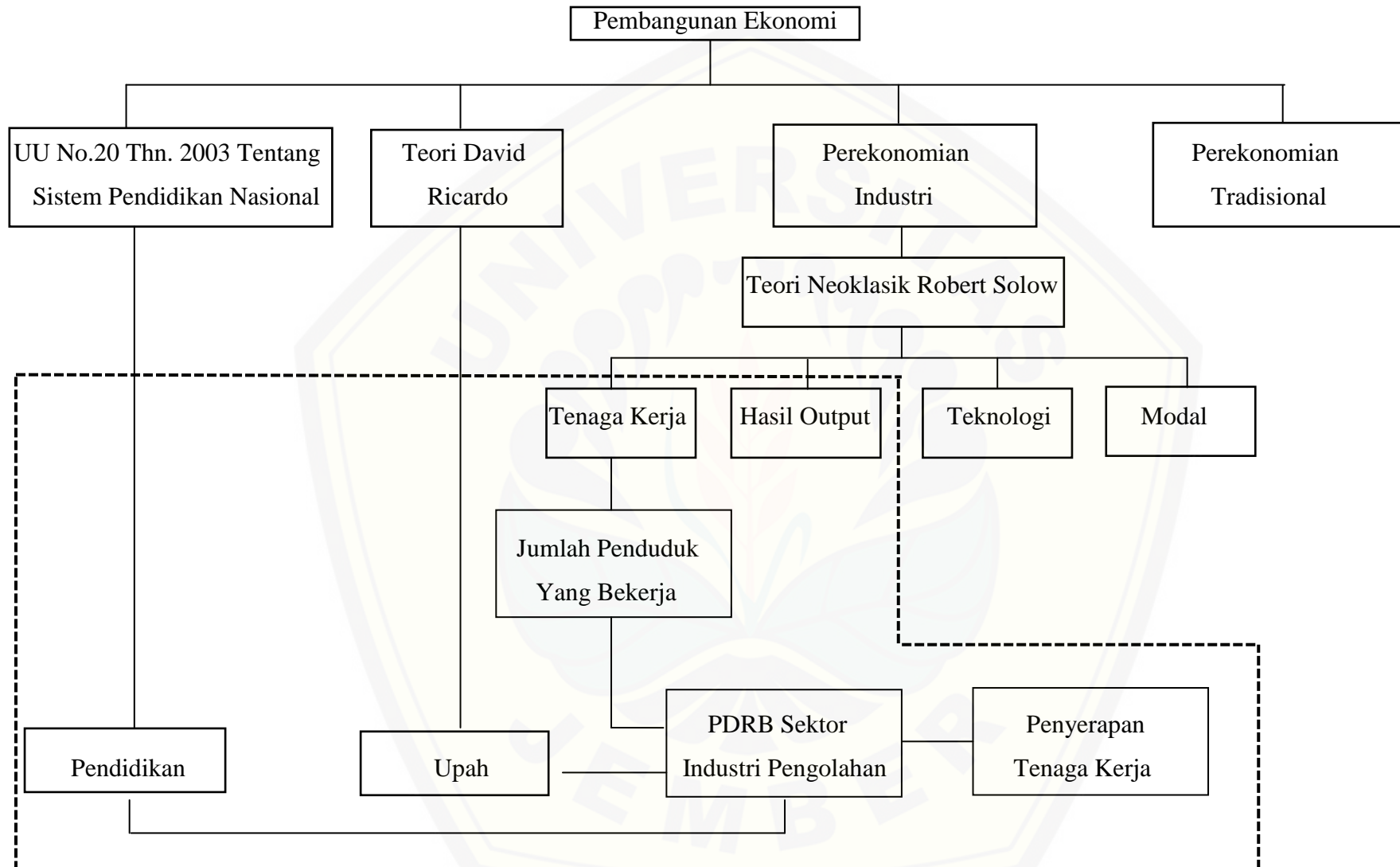
Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir penulis sebagai penjelasan alur penelitian sehingga diperoleh gambaran tentang fokus penelitian berdasarkan teori dan kajian empiris. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa sektor Industri tumbuh lebih cepat dibanding dengan sektor lainnya. Seperti halnya sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur yang semakin mengalami perkembangan dan pertumbuhan dan diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap produk domestik dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Meningkatnya angka pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menyejahterakan masyarakat karena dengan adanya sarana dan prasarana atau fasilitas untuk mendukung segala kegiatan perekonomian disuatu daerah. Beberapa sektor yang tercantum pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor Industri Pengolahan terus mengalami kenaikan dan semakin memberi kontribusi kepada sektor-sektor yang lain.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja juga memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara jumlah pekerja dan tingkat upah. Tenaga kerja juga dapat mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam hal ini adalah melalui jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi kerja di Provinsi Jawa Timur sehingga produktivitas atau kualitas sumber daya manusianya dapat optimal dalam mengelola sumber daya alam maupun buatan sehingga dapat memproduksi suatu barang dan jasa menjadi lebih bermanfaat atau dapat memberi nilai pada suatu barang ataupun jasa. Konteks permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan suatu upah pada suatu perusahaan. Menurut Sumarsono (2003:12), permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor lainnya seperti perubahan hasil produksi dan harga barang modal menjadi turun. Jadi pada dasarnya tenaga kerja yang bekerja pada suatu periode tertentu tidak akan lepas dari sistem upah yang nantinya akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan suatu upaya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dapat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah. Semakin meningkatnya upah atau besarnya UMK yang diberikan maka kesejahteraan pekerja atau masyarakatnya yang bekerja akan semakin meningkat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) suatu daerah dapat diketahui dengan adanya aktivitas ekonomi yang

baik. Adanya sektor Industri yang berkembang adalah salah satu sumber pendapatan lokal atau pendapatan daerah. Perputaran uang akan terjadi pada daerah tersebut (akan kembali pada daerah itu sendiri), sama halnya ketika masyarakat membayar pajak maka akan kembali ke pendapatan daerah dengan adanya aktivitas ekonomi yang dengan membayar pajak berarti pembangunan dan pemerataan dapat terlaksana. Pengembangan pada sarana dan prasarana yang dapat melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi seperti memproduksi barang atau jasa dapat pula memberikan kontribusi ke pemasukan atau pendapatan daerah tersebut.

Selain pembangunan dan pertumbuhan pada bidang ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan pada bidang pendidikan juga penting karena pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia yang dapat menciptakan sumber daya manusia atau penduduk yang berkualitas yang pada akhirnya akan membawa dampak baik bagi daerah itu sendiri (dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur). Dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan, masyarakat tersebut akan mendapat wawasan yang lebih luas dan dapat mengembangkan pengetahuan yang didapat dari pendidikan. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas akan semakin meningkatkan produktivitas penduduknya karena tenaga kerja termasuk sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan suatu daerah atau negara.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual (Sumber: Peneliti, 2019)

2.4 Research Gap

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh variabel PDRB tersebut dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan estimasi *panel least square* (PLS) dan dengan penentuan model *fixed effect model* (FEM). Penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaruh variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai X1, variabel UMK sebagai X2, dan variabel Pendidikan sebagai X3 terhadap variabel independen yaitu Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Y yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga nanti hasilnya dapat diketahui apakah sektor Industri Pengolahan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2012-2016.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2012-2016.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2012-2016.
3. Pendidikan akan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2012-2016.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pergerakan tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku, artikel, laporan bulanan atau tahunan pemerintah, jurnal dan sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Pengolahan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2012-2016 sebagai variabel independen.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagai variabel independen.
3. Pendidikan dalam rata lama sekolah penduduk di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagai variabel independen.
4. Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri yang bekerja di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagai variabel dependen.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Metode yang digunakan adalah menggunakan Analisis Data Panel yang merupakan gabungan antara data *cross-section* dan data *time-series*. Menurut Gujarati (2015), data *cross-section* terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama, seangkan data *time-series* adalah kumpulan observasi terhadap nilai-nilai dengan tempat atau lokasi yang sama dengan periode waktu yang berbeda. Menurut Basuki (2016:276) regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Metode pada penelitian ini adalah menggunakan analisis

data deskriptif kuantitatif terhadap pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian diklarifikasikan untuk dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data *cross-section* 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan *time-series* dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dan menggunakan dokumentasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, data pendidikan penduduk dan data Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. Seluruh data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber pustaka.

Berikut adalah beberapa keuntungan analisis data panel:

1. Observasi *cross section* yang berulang-ulang, paling tepat untuk mengukur dinamika perubahan.
2. Adanya batasan heterogenitas dalam unit tersebut.
3. Data panel dapat meminimumkan bias apabila kita meregres individu atau perusahaan kedalam agree besar.
4. Gabungan antara *cross section* dan *time series* dapat memberikan informasi yang lengkap, sedikit kolineritas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, lebih banyak variasi dan lebih efisien.

3.3.2 Metode Estimasi Model Regresi Panel

Menurut Basuki (2016:276-27), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Common Effect Model*.

1. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu ataupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it} \beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Y : Variabel Dependen
 α : Konstanta
 X^I : Variabel Independen 1
 β : Koefisien Regresi
 ε : Error Terms
 t : Periode waktu/tahun
 i : *Cross Section* (individu)

Dalam menganalisis data panel, ada dua model pendekatan yang dapat digunakan, yaitu (Gujarati, 2005:121):

1. *Fixed Effect Model (FEM)*, menetapkan bahwa α_i adalah kelompok yang spesifik atau berbeda dalam constan terms dalam model regresinya.
2. *Random Effect Model (REM)*, meletakkan α_i sebagai gangguan spesifik kelompok seperti halnya ε_{it} , kecuali untuk setiap kelompok, tetapi gambaran tunggal yang memasukka regresi sama setiap periode atau dengan kata lain REM menganggap bahwa seluruh gangguan yang terjadi memiliki sifat acak (*random*).

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui pihak-pihak terkait yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh didapat dari instansi dan pihak yang memiliki kaitan atau wewenang secara langsung seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dan studi pustaka terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan penelitian dan pencarian di perpustakaan atau di situs internet. Data yang dikumpulkan yaitu data jumlah penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Timur, rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Industri Pengolahan tahun 2012-2016,

3.3.3 Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah

H_0 = model mengikuti *common effect*

H_a = model mengikuti *fixed effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis tersebut adalah membandingkan perhitungan $F_{\text{statistik}}$ dan F_{tabel} . Perbandingan dipakai apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak, berarti model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*. Begitu sebaliknya, jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan model yang tepat digunakan adalah *common effect* (Wulandari, 2007). Apabila hasil uji chow ditentukan oleh metode *common effect*, maka tidak perlu diuji dengan metode uji hausman, namun apabila dari hasil uji chow ditentukan metode *fixed effect*, maka harus diuji hausman guna memilih antara metode *fixed effect* atau *random effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik yang berfungsi untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Uji Hausman akan memberikan penilaian dengan *chi square static* sehingga keputusan pemilihan model dapat ditentukan secara besar. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = model *random effect*

H_a = model *fixed effect*

Jika $chi\text{-square}_{\text{hitung}} > chi\text{-square}_{\text{table}}$ dan probabilitas $< \alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 ditolak sehingga model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Apabila $chi\text{-square}$ dan probabilitas hitung $> \alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 diterima sehingga model *random effect* lebih tepat digunakan.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model *random effect* atau *common effect* (OLS) paling tepat digunakan. Uji signifikan *random effect* ini dikembangkan Breusch Pagan dan untuk menguji signifikansi *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H_0 = model mengikuti *common effect model*

H_a = model mengikuti *random effect model*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi square* dengan *deggre of freedom* sebesar jumlah variable independen. Jika nilai LM statistic lebih besar dari nilai kritis statistik *chi square*, maka menolak H_0 , artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *random effect*. Sebaliknya apabila nilai LM statistic lebih kecil dari nilai *chi*

square sebagai nilai kritis, maka H_0 diterima yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel metode *common effect* bukan metode *random effect*. (Wulandari, 2017).

3.3.4 Uji Statistik

Digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah dengan cara:

1. Uji F

Digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel bebas. Rumus yang digunakan adalah Gujarati (2004:120). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dimaksudkan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan. Uji F dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Gujarati, 2005, 121):

$$F_h = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

F = pengujian secara simultan

R^2 = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya data

k-1 = derajat bebas pembilang

n-k = derajat bebas penyebut

Kriteria Pengujian:

1. $H_0 : b_1 = 0 \rightarrow$ variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja.
2. $H_a : b_1 \neq 0 \rightarrow$ variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Keputusan:

1. Bila probabilitas t hitung $\leq \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antar variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja.
2. Bila probabilitas t hitung $\leq \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga ada pengaruh signifikan antar variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk memberi pembuktian signifikan tidaknya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan rumus Gujarati (2004:120):

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan:

- t = test signifikan dengan angka korelasi
 b_i = koefisien regresi hasil estimasi untuk variabel ke i
 $Se(b_i)$ = *standart error* dari koefisien korelasi

Formulasi hipotesis uji t:

1. $H_0 : b_i = 0, i = 1, 2, 3$
tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
2. $H_0 : b_i \neq 0, i = 1, 2, 3$
ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
3. *Level of Significance* 5% (uji 2 sisi, $5\% : 2 = 2,5\%$ atau 0,025).
4. Jika probabilitas $t_{hitung} \leq \alpha$: H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada pengaruh parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat:

5. Jika probabilitas $t_{hitung} > \alpha$: H_0 diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

6. R^2 (koefisien determinasi)

adalah data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat atau dapat dikaitkan bahwa penggunaan model tersebut bias dibenarkan. Dari koefisien ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel X terhadap naik turunnya variabel Y. (Gujarati, 2004:120). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai koefisien determinasi tersebut, maka semakin lemah kemampuan model tersebut dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Apabila semakin dekat angka R^2 dengan 1, maka semakin baik karena mampu menjelaskan data aktual, sedangkan semakin mendekati 0, maka akan kurang baik karena kurang mampu menjelaskan model.

3.3.5 Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Basuki (2016: 297) mengatakan bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) meliputi uji Linieritas Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas, dan Normalitas. Penjelasan uji Multikolinieritas dan Heroskedastisitas menurut Basuki (2016:108) :

1. Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah nilai residual dari sebuah model regresi mempunyai kontribusi normal (Wardhono, 2004:17). Konsep pengujian ini menggunakan pendekatan *Jarque-Berra test*. Dengan menggunakan kriterianya:

- a. Jika nilai probabilitas $JB_{hitung} > 0,05$, maka hipotesis model terdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas $JB_{hitung} \leq 0,05$, maka hipotesis model tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Auxiliary Regression* dengan

membuat lima model regresi dengan variabel dependen yang berbeda secara berurut variabel dependen regresi 1-5 yakni; NAV Reksadana Campuran Syariah, Kurs Rupiah, Inflasi, BI Rate dan *Gross Domestic Product* (GDP). Data penelitian dinyatakan lulus bebas dari multikolinieritas jika *R-square* model 1 lebih besar dari *R-square* lainnya. (Winarno, 2015:5.3).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji untuk melihat adanya ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Metode yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah Uji White, Glejser, Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, dan ARCH. Model memenuhi persyaratan jika nilai probabilitas *chi-square* melebihi nilai $\alpha 0,5$. (Winarno, 2011:5.14).

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi variabel operasional dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian dari variabel tersebut dan meluasnya permasalahan, maka diberikan deskripsi data dari penelitian sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Industri Pengolahan (X1) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga konstan dan dinyatakan dalam milyar rupiah selama periode tahun 2012-2016.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (X2) adalah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2012-2016 dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Pendidikan (X3) adalah jumlah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2012-2016 dan dinyatakan dalam tahun.
4. Tenaga Kerja (Y) adalah. Jumlah angkatan kerja pertahun adalah tenaga kerja yang terserap akibat adanya pertumbuhan dan pengembangan di sektor Indutri Pengolahan di Jawa Timur setiap tahunnya. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang termasuk dalam angkatan kerja yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan dalam jumlah orang pertahun.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja memiliki kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan, maka semakin berkontribusi terhadap angka Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur.
3. Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2016. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau rata lama sekolah, semakin tinggi pula kontribusinya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi tenaga kerja yang produktif dan memiliki kinerja yang bagus, ada baiknya pemerintah membuat kebijakan agar tercipta sumber daya manusia yang lebih unggul. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas perekonomian suatu daerah atau negara. Semakin tinggi dan baik kualitas sumber daya manusianya, maka akan meningkatkan produktivitas sehingga semakin besar peluang untuk terciptanya inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini juga dapat berdampak pada nilai upah yang diterima oleh pekerja atau buruh di suatu daerah tersebut dengan kualitas sumber daya manusia dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat (dalam hal ini adalah pekerja atau buruh) secara keseluruhan yang nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas

dan dapat berdampak pada pengurangan masalah ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Pengangguran sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah ataupun suatu negara.

Selain ketenagakerjaan dan upah, pemerintah baiknya meningkatkan program dalam bidang pendidikan seperti menyediakan fasilitas pendidikan atau memberikan beasiswa karena faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tenaga kerja yang terserap serta semakin baik pula proses pembangunan yang berlangsung di daerah tersebut. Selain itu, peningkatan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur hendaknya juga diikuti dengan pemerataan pembangunan dan diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur lebih menggerakkan sektor perekonomian sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. Nur Rianto Al. 2017. *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia*. Jakarta: Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arifin, Moch. 2010. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah 1986-2008*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2016/2017*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur, Februari 2018*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Bungin, M. B. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Made Ika Prasetya. 2014. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran di Provinsi Bali*. Bali: Universitas Udayana.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Furqon, Ahmad Mujahidul. 2014. *Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik tahun 1998-2012*. Malang: Universitas Brawijaya.

Gujarati, Domador. 2004. *Ekonometrika Dasar.*, Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

Hanuraga, Ma'ruf. 2018. *Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia (studi: 6 Provinsi di Jawa)*. Jember: Univeristas Jember.

Hartono, Rudi. 2018. *Dinamika Konsentrasi Industri Pengolahan di Jawa Timur Tahun 2012-2015*. Jember: Universitas Jember.

Hasanah, Erfatul. 2018. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2016*. Jember: Univeristas Jember.

Ibnurrasyah, Zainuddin. 2016. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Irawan, I Made Tony. 2014. *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*. Bali: Universitas Udayana.

Jhingan, M.L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.

Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kusumasari, Karlina. 2018. *Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Digermakertosusila Plus*. Jember: Univeristas Jember.

Maharani, Dewi. 2016. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mustaram, Razi Apriansyah, Binar Dwiyanto Pamungkas, dan Kurniawansyah. 2017. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2016*. Sumbawa: Universitas Sumawa.

Nata, Bagas Frendy. 2015. *Pengaruh UMK, Jumlah Unit, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

- Rahmawati. 2018. *Analisis Pendidikam, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur Periode 2011-2016*. Jember: Univeristas Jember.
- Simanjuntak, P.J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, P.J. 2002. *Masalah Upah dan Jaminan Sosial*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabet.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, Michael P. 2001. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P, dan Smith, S, C. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984. *Tentang Perindustrian*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Widjadjanti, Anjar, Yuniarto Fajar Nugroho dan Achmad Qosjim. 2015. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011*. Jember: Universitas Jember.
- Wicaksono, R. 2009. *Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008*. Semarang: Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran A.

Data Penyerapan Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan RLS (Rata Lama Sekolah/Pendidikan) di Provinsi Jawa Timur 2012-2016.

Wilayah Jawa Timur	PDRB (Rupiah)	P.Tenaga Kerja (Jiwa)	UMK (Rupiah)	RLS (Tahun)
Kab. Pacitan_2012	586.30	345898	750000	6.96
Kab. Pacitan_2013	638.90	339352	887150	7.01
Kab. Pacitan_2014	703.80	339681	1000000	7.27
Kab. Pacitan_2015	763.10	345270	1150000	7.37
Kab. Pacitan_2016	831.10	349759	1283000	7.23
Kab. Ponorogo_2012	744.10	446382	745000	7.18
Kab. Ponorogo_2013	817.70	483962	924000	7.49
Kab. Ponorogo_2014	90.10	474183	1000000	7.28
Kab. Ponorogo_2015	1005.80	478260	1150000	7.05
Kab. Ponorogo_2016	1101.90	467372	1283000	6.89
Kab. Trenggalek_2012	1413.60	396804	760000	7.31
Kab. Trenggalek_2013	1537.70	399772	903900	7.33
Kab. Trenggalek_2014	1723.70	397668	1000000	7.41
Kab. Trenggalek_2015	1919.60	382330	1150000	7.65
Kab. Trenggalek_2016	2091.50	394587	1283000	6.97
Kab. Tulungagung_2012	4414.30	527516	815000	7.95
Kab. Tulungagung_2013	479.30	536567	1007900	7.79
Kab. Tulungagung_2014	5281.70	536447	1107000	7.89
Kab. Tulungagung_2015	5873.80	551480	1273050	8.16
Kab. Tulungagung_2016	6486.60	525867	1420000	7.19
Kab. Blitar_2012	2572.20	569840	815000	7.40
Kab. Blitar_2013	2788.00	618580	946850	7.41
Kab. Blitar_2014	3077.70	603443	1000000	7.49
Kab. Blitar_2015	3435.40	587403	1260000	7.64
Kab. Blitar_2016	3779.10	580982	1405000	7.73
Kab. Kediri_2012	4837.90	700249	999000	7.72
Kab. Kediri_2013	4794.90	76957	1089950	7.75
Kab. Kediri_2014	5288.50	754316	1135000	7.88

Lanjutan Lampiran A.

Kab. Kediri_2015	5829.60	747065	1305250	7.82
Kab. Kediri_2016	6403.70	760682	1456000	7.25
Kab. Malang_2012	15792.40	1188413	1130000	7.08
Kab. Malang_2013	17202.30	1278427	1343700	7.08
Kab. Malang_2014	19775.40	1242884	1635000	7.17
Kab. Malang_2015	22298.10	1212028	1962000	7.24
Kab. Malang_2016	24784.70	1228309	2188000	7.58
Kab. Lumajang_2012	3302.20	466105	825391	6.43
Kab. Lumajang_2013	3645.80	501928	1011950	6.52
Kab. Lumajang_2014	4144.80	505090	1120000	6.62
Kab. Lumajang_2015	4600.80	500104	1288000	6.26
Kab. Lumajang_2016	5206.30	518184	1437000	6.98
Kab. Jember_2012	8601.80	1172949	9200000	6.79
Kab. Jember_2013	8983.60	1106262	1091950	6.80
Kab. Jember_2014	10039.20	1123266	1270000	6.24
Kab. Jember_2015	11198.00	1103779	1460500	6.44
Kab. Jember_2016	12154.70	1117132	1629000	6.05
Kab. Banyuwangi_2012	4798.20	733971	915000	7.25
Kab. Banyuwangi_2013	5285.70	851945	1086400	7.25
Kab. Banyuwangi_2014	5852.20	838622	1240000	7.10
Kab. Banyuwangi_2015	6549.40	780835	1426000	6.99
Kab. Banyuwangi_2016	7229.60	871029	1599000	6.05
Kab. Bondowoso_2012	2296.20	377315	800000	5.94
Kab. Bondowoso_2013	2486.30	395928	946000	5.94
Kab. Bondowoso_2014	2724.40	386153	1105000	5.36
Kab. Bondowoso_2015	3106.20	400655	1270750	5.36
Kab. Bondowoso_2016	3312.10	417437	1417000	6.93
Kab. Situbondo_2012	1668.90	331391	802500	6.22
Kab. Situbondo_2013	1869.00	346240	1048000	6.28
Kab. Situbondo_2014	2102.10	345122	1071000	6.36

Lanjutan Lampiran A.

Kab. Situbondo_2015	2380.80	334065	1209900	6.41
Kab. Situbondo_2016	2661.30	351821	1374000	5.54
Kab. Probolinggo_2012	3969.70	596345	888500	5.92
Kab. Probolinggo_2013	4476.10	624454	1103200	6.31
Kab. Probolinggo_2014	5010.80	598256	1353750	5.90
Kab. Probolinggo_2015	4649.80	592540	1556800	6.09
Kab. Probolinggo_2016	6191.70	586555	1736000	5.68
Kab. Pasuruan_2012	43678.20	784210	1252000	6.83
Kab. Pasuruan_2013	47589.30	766766	1195800	6.88
Kab. Pasuruan_2014	53259.50	795706	2190000	7.06
Kab. Pasuruan_2015	59013.40	806291	2700000	7.10
Kab. Pasuruan_2016	64703.30	762757	3037500	5.67
Kab. Sidoarjo_2012	51121.50	957899	1252000	9.92
Kab. Sidoarjo_2013	55288.70	957887	1720000	10.23
Kab. Sidoarjo_2014	61953.50	996960	2190000	10.11
Kab. Sidoarjo_2015	6856.30	1028243	2705000	10.46
Kab. Sidoarjo_2016	73636.80	1015208	3040000	6.58
Kab. Mojokerto_2012	22838.80	488795	1234000	7.94
Kab. Mojokerto_2013	24860.90	539139	1700000	8.22
Kab. Mojokerto_2014	27823.10	528416	2050000	8.32
Kab. Mojokerto_2015	30689.90	532294	2695000	8.19
Kab. Mojokerto_2016	33660.10	552002	3030000	10.22
Kab. Jombang_2012	4415.20	557227	978200	8.04
Kab. Jombang_2013	4784.50	570047	1200000	8.06
Kab. Jombang_2014	5261.00	560677	1500000	8.28
Kab. Jombang_2015	5779.30	577679	1725000	8.10
Kab. Jombang_2016	6280.60	607856	1924000	7.76
Kab. Nganjuk_2012	1795.00	480019	785000	7.61
Kab. Nganjuk_2013	1975.00	508859	960200	7.62
Kab. Nganjuk_2014	2197.60	523384	1131000	7.67
Kab. Nganjuk_2015	2440.70	513031	1265000	7.80
Kab. Nganjuk_2016	2689.50	506132	1411000	7.68
Kab. Madiun_2012	1001.40	340017	775000	7.44
Kab. Madiun_2013	1103.30	349831	953000	7.47

Lanjutan Lampiran A.

Kab. Madiun_2014	1223.00	349178	1045000	7.74
Kab. Madiun_2015	1358.30	350522	1196000	7.54
Kab. Madiun_2016	1499.10	327148	1340000	7.34
Kab. Magetan_2012	982.80	338847	750000	7.85
Kab. Magetan_2013	1083.50	342553	866250	7.86
Kab. Magetan_2014	1212.40	343882	1000000	7.99
Kab. Magetan_2015	1335.90	328845	1150000	8.15
Kab. Magetan_2016	1465.90	331493	1283000	7.00
Kab. Ngawi_2012	936.80	397707	780000	7.02
Kab. Ngawi_2013	1040.30	410090	900000	7.06
Kab. Ngawi_2014	1178.80	448634	1040000	7.04
Kab. Ngawi_2015	1289.40	412831	1150000	6.72
Kab. Ngawi_2016	1402.90	413822	1334000	7.66
Kab. Bojonegoro_2012	2361.10	577451	930000	6.72
Kab. Bojonegoro_2013	2634.50	633960	1029500	6.72
Kab. Bojonegoro_2014	2952.80	654915	1140000	6.73
Kab. Bojonegoro_2015	3205.90	608174	1311000	7.28
Kab. Bojonegoro_2016	3494.80	608181	1462000	6.54
Kab. Tuban_2012	10268.30	552400	970000	6.53
Kab. Tuban_2013	11366.30	556649	1144400	6.82
Kab. Tuban_2014	12490.70	590812	1370000	6.81
Kab. Tuban_2015	13651.80	548541	1575500	6.83
Kab. Tuban_2016	14391.20	584743	1757000	6.65
Kab. Lamongan_2012	1464.60	544619	950000	7.59
Kab. Lamongan_2013	1615.80	592097	1075700	7.79
Kab. Lamongan_2014	1881.90	612448	1220000	7.86
Kab. Lamongan_2015	2156.00	585311	1410000	7.61
Kab. Lamongan_2016	2452.00	607096	1573000	6.25
Kab. Gresik_2012	36088.60	535346	1257000	8.98
Kab. Gresik_2013	39960.10	532304	1740000	9.00

Lanjutan Lampiran A.

Kab. Gresik_2014	45217.90	591514	2195000	8.87
Kab. Gresik_2015	49572.70	562559	2707500	9.31
Kab. Gresik_2016	52567.50	577049	3042500	7.29
Kab. Bangkalan_2012	1464.60	416538	885000	5.74
Kab. Bangkalan_2013	1615.80	444345	983800	5.75
Kab. Bangkalan_2014	1881.90	441663	1102000	5.94
Kab. Bangkalan_2015	2156.00	446517	1267300	5.79
Kab. Bangkalan_2016	2452.00	457282	1414000	8.94
Kab. Sampang_2012	396.80	460147	800000	4.22
Kab. Sampang_2013	452.20	482807	1104600	4.39
Kab. Sampang_2014	473.80	447743	1120000	4.62
Kab. Sampang_2015	514.00	496322	1231650	4.84
Kab. Sampang_2016	555.60	447470	1287000	5.13
Kab. Pamekasan_2012	528.10	441214	975000	6.32
Kab. Pamekasan_2013	587.20	461339	1059600	6.42
Kab. Pamekasan_2014	664.90	469849	1090000	6.55
Kab. Pamekasan_2015	750.10	459046	1201750	6.54
Kab. Pamekasan_2016	825.80	425333	1350000	3.79
Kab. Sumenep_2012	942.30	636110	825000	5.71
Kab. Sumenep_2013	1061.80	629881	965000	5.73
Kab. Sumenep_2014	1200.40	613293	1090000	5.62
Kab. Sumenep_2015	1337.80	616145	1253500	5.76
Kab. Sumenep_2016	1468.90	580887	1398000	6.08
Kota Kediri_2012	59017.50	123522	1037500	10.24
Kota Kediri_2013	65092.00	129938	1128400	10.29
Kota Kediri_2014	71662.70	125726	1165000	10.16
Kota Kediri_2015	79832.10	134293	1339750	10.25
Kota Kediri_2016	87295.00	130564	1494000	5.08
Kota Blitar_2012	329.00	62730	815000	9.77
Kota Blitar_2013	364.40	63854	924800	9.87

Lanjutan Lampiran A.

Kota Blitar_2014	406.60	64373	1000000	9.97
Kota Blitar_2015	457.20	65402	1243200	10.08
Kota Blitar_2016	502.40	72650	1294000	9.89
Kota Malang_2012	11096.50	402875	1132000	10.87
Kota Malang_2013	12090.50	386483	1340300	10.89
Kota Malang_2014	12637.50	401435	1387000	10.81
Kota Malang_2015	13736.40	393050	1882250	10.55
Kota Malang_2016	14521.80	377329	2099000	9.88
Kota Probolinggo_2012	963.90	99075	885000	8.67
Kota Probolinggo_2013	1052.00	196176	1198600	8.79
Kota Probolinggo_2014	1143.50	101150	1250000	8.24
Kota Probolinggo_2015	1269.50	107668	1437500	8.80
Kota Probolinggo_2016	1364.40	104953	1603000	10.14
Kota Pasuruan_2012	924.90	86364	1252000	9.05
Kota Pasuruan_2013	1007.60	91303	1720000	9.07
Kota Pasuruan_2014	1126.20	92850	1360000	8.68
Kota Pasuruan_2015	1253.20	91212	1575000	9.15
Kota Pasuruan_2016	1352.10	92058	1757000	8.47
Kota Mojokerto_2012	408.00	57101	875000	10.11
Kota Mojokerto_2013	444.80	61407	1040000	10.12
Kota Mojokerto_2014	493.50	62123	1250000	10.06
Kota Mojokerto_2015	549.80	61771	1437500	10.10
Kota Mojokerto_2016	607.10	63806	1603000	9.08
Kota Madiun_2012	1252.00	79897	812500	10.46
Kota Madiun_2013	1369.70	78855	953000	10.54
Kota Madiun_2014	1490.90	84179	1066000	10.66
Kota Madiun_2015	1637.10	80613	1250000	11.22
Kota Madiun_2016	1807.90	86092	1395000	11.22
Kota Surabaya_2012	57162.30	1230165	1257000	10.10
Kota Surabaya_2013	62295.30	1361648	1740000	10.12
Kota Surabaya_2014	70956.50	1404445	2200000	10.08
Kota Surabaya_2015	78134.50	1380157	2710000	10.54
Kota Surabaya_2016	85213.30	1365180	3045000	11.09
Kota Batu_2012	365.30	101413	1100215	8.54

Lanjutan Lampiran A.

Kota Batu_2013	408.20	100364	1268000	8.76
Kota Batu_2014	467.40	103024	1380037	8.66
Kota Batu_2015	536.40	104177	1877000	8.94
Kota Batu_2016	599.90	100970	1877000	10.44



Lampiran B. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	92.194953	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	523.483158	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 01/26/19 Time: 09:31

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42610.34	6753.225	-6.309628	0.0000
PDRB	0.027161	0.004361	6.228017	0.0000
UMK	0.005058	0.001760	2.873453	0.0011
PDDKN	4343.301	788.8553	5.505827	0.0015
R-squared	0.558278	Mean dependent var	13990.45	
Adjusted R-squared	0.579818	S.D. dependent var	11640.22	
S.E. of regression	7545.358	Akaike info criterion	20.72156	
Sum squared resid	8.31E+09	Schwarz criterion	20.80184	
Log likelihood	-1550.117	Hannan-Quinn criter.	20.75417	
F-statistic	69.53613	Durbin-Watson stat	0.563847	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran C. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.849989	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	0.002666	0.012608	0.000027	0.0001
UMK	0.001457	0.001573	0.000000	0.0000
PDDKN	-2411.949416	-1592.052335	38274.491821	0.0005

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 01/26/19 Time: 09:31

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	483613.5	56365.66	8.579932	0.0000
PDRB	0.014321	0.903768	0.015846	0.0129
UMK	0.010722	0.006977	1.536854	0.0002
PDDKN	674.5219	6789.684	0.099345	0.0044

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976683	Mean dependent var	503376.9
Adjusted R-squared	0.969607	S.D. dependent var	306131.1
S.E. of regression	53369.62	Akaike info criterion	24.81126
Sum squared resid	4.13E+11	Schwarz criterion	25.58030
Log likelihood	-2312.070	Hannan-Quinn criter.	25.12279
F-statistic	138.0350	Durbin-Watson stat	2.883336
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D. Hasil Analisis Data Panel Menggunakan *Fixed Effect Model*.

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 01/26/19 Time: 09:30

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	483613.5	56365.66	8.579932	0.0000
PDRB	0.014321	0.903768	0.015846	0.0129
UMK	0.010722	0.006977	1.536854	0.0002
PDDKN	674.5219	6789.684	0.099345	0.0044

Effects Specification

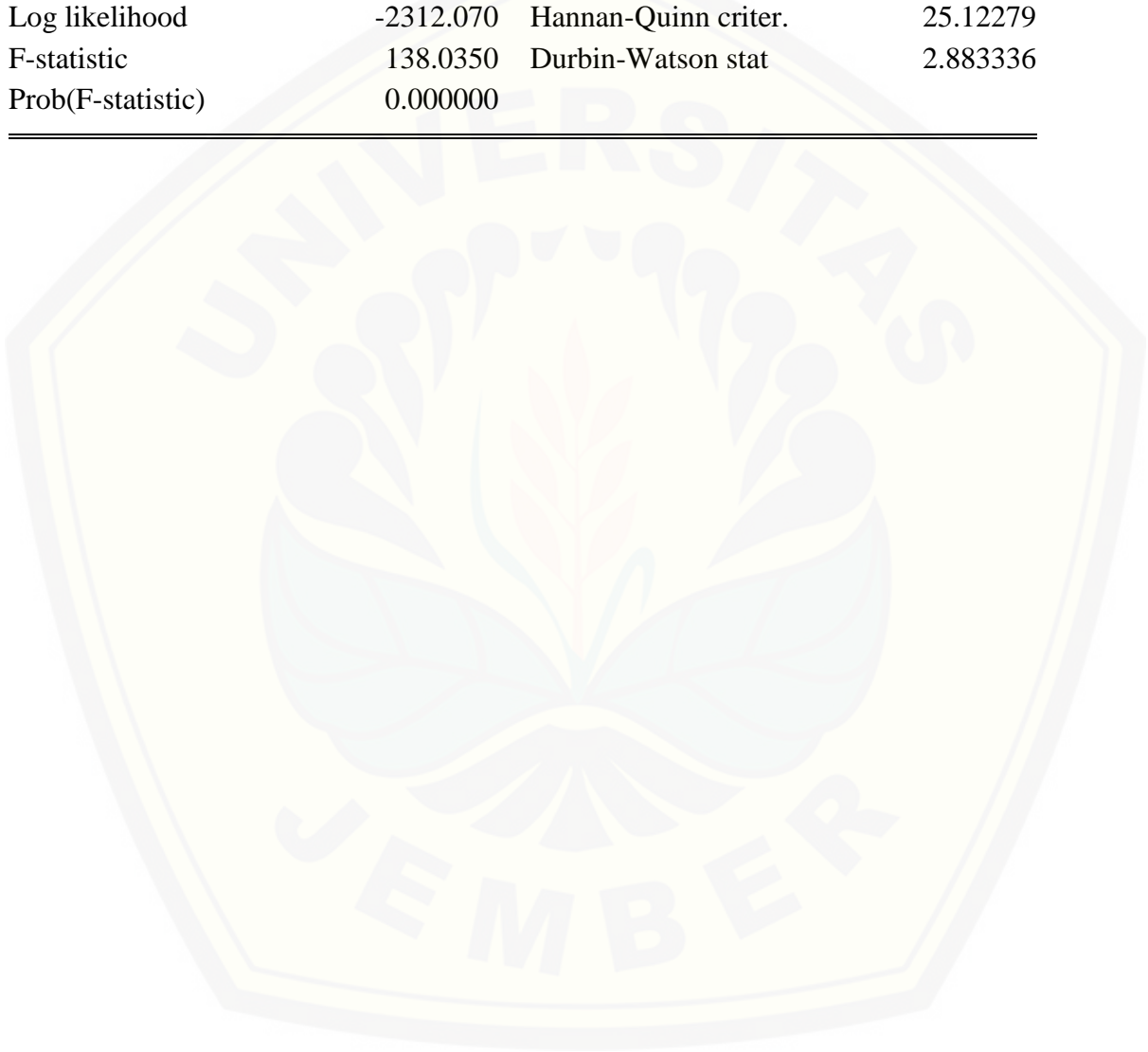
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976683	Mean dependent var	503376.9
Adjusted R-squared	0.969607	S.D. dependent var	306131.1
S.E. of regression	53369.62	Akaike info criterion	24.81126
Sum squared resid	4.13E+11	Schwarz criterion	25.58030
Log likelihood	-2312.070	Hannan-Quinn criter.	25.12279
F-statistic	138.0350	Durbin-Watson stat	2.883336
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E. Hasil Uji F Simultan

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976683	Mean dependent var	503376.9
Adjusted R-squared	0.969607	S.D. dependent var	306131.1
S.E. of regression	53369.62	Akaike info criterion	24.81126
Sum squared resid	4.13E+11	Schwarz criterion	25.58030
Log likelihood	-2312.070	Hannan-Quinn criter.	25.12279
F-statistic	138.0350	Durbin-Watson stat	2.883336
Prob(F-statistic)	0.000000		



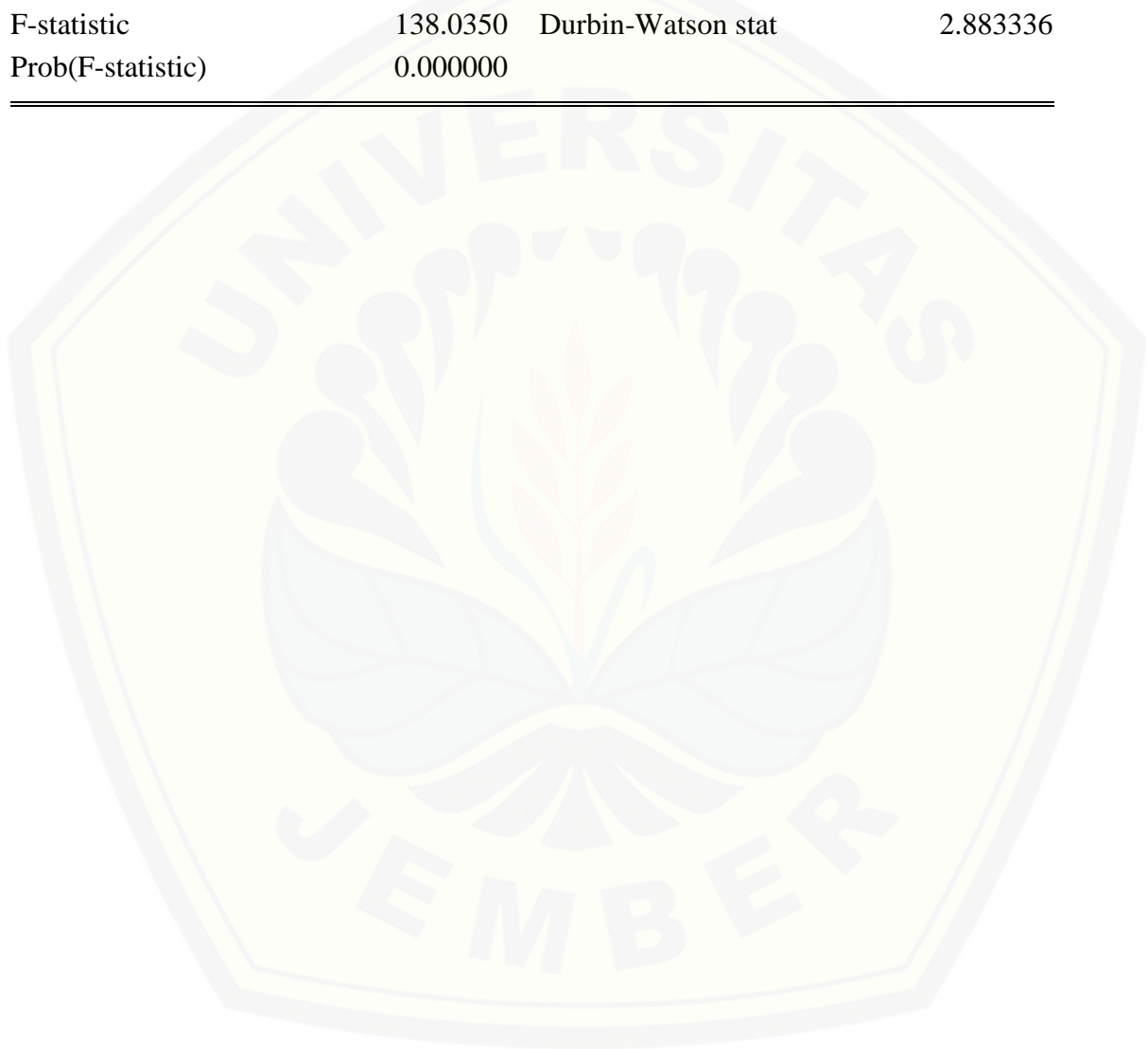
Lampiran F. Hasil Uji T-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	483613.5	56365.66	8.579932	0.0000
PDRB	0.014321	0.903768	0.015846	0.0129
UMK	0.010722	0.006977	1.536854	0.0002
PDDKN	674.5219	6789.684	0.099345	0.0044



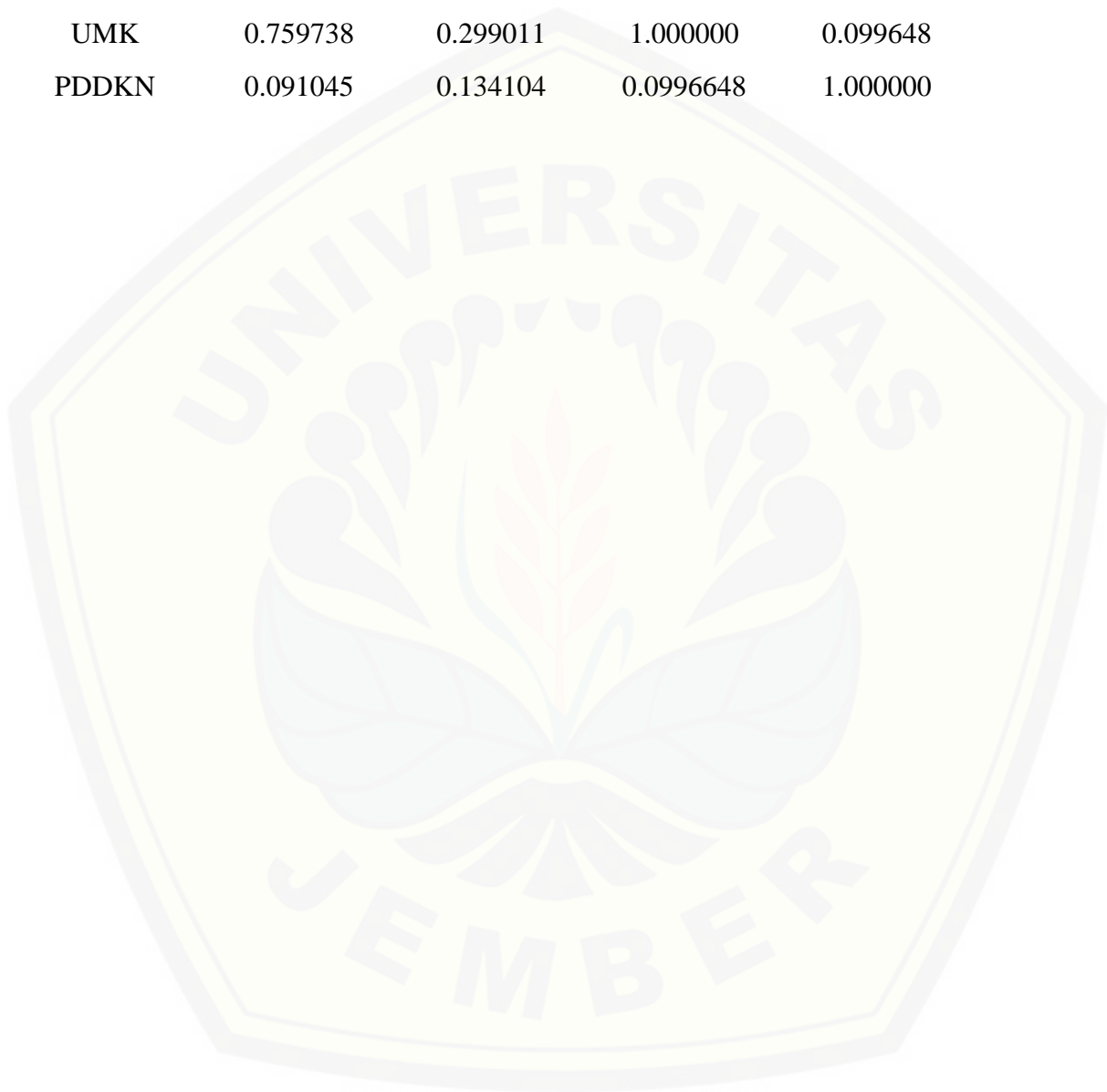
Lampiran G. Hasil Koefisien Determinasi (R^2).

R-squared	0.976683	Mean dependent var	503376.9
Adjusted R-squared	0.969607	S.D. dependent var	306131.1
S.E. of regression	53369.62	Akaike info criterion	24.81126
Sum squared resid	4.13E+11	Schwarz criterion	25.58030
Log likelihood	-2312.070	Hannan-Quinn criter.	25.12279
F-statistic	138.0350	Durbin-Watson stat	2.883336
Prob(F-statistic)	0.000000		

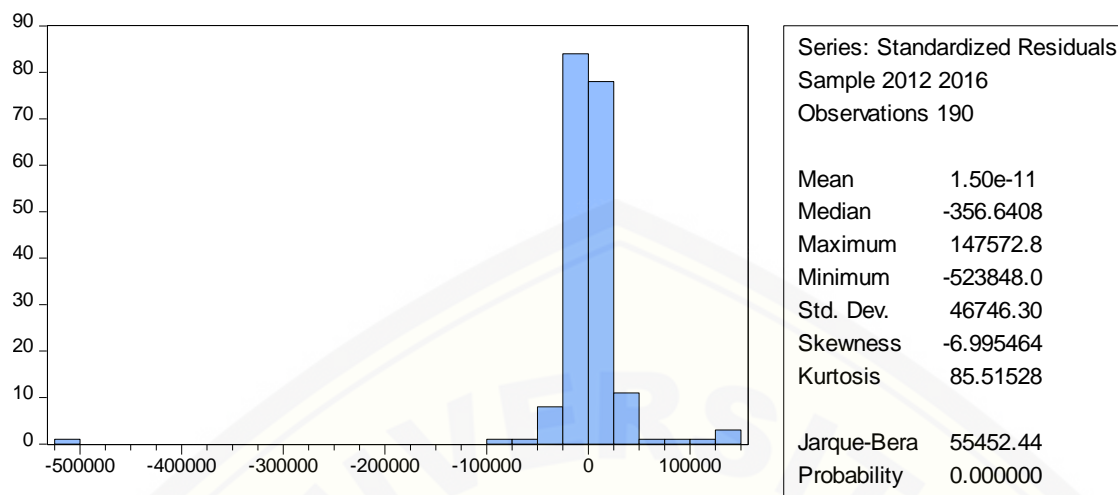


Lampiran H. Hasil Uji Multikolinieritas.

	TK	PDRB	UMK	PDDKN
TK	1.000000	0.126778	0.759738	0.091045
PDRB	0.1226778	1.000000	0.299011	0.134104
UMK	0.759738	0.299011	1.000000	0.099648
PDDKN	0.091045	0.134104	0.0996648	1.000000



Lampiran I. Hasil Uji Normalitas.



Lampiran J. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 01/26/19 Time: 10:17

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.042369	0.123440	0.343236	0.7320
PDRB	-0.016206	0.018686	-0.867284	0.3874
UMK	0.003190	0.007898	0.401917	0.6870
PDDKN	-0.033406	0.041917	-0.796973	0.4269

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.404543	Mean dependent var	1367.256
Adjusted R-squared	0.392308	S.D. dependent var	1735.143
S.E. of regression	1352.624	Akaike info criterion	17.28379
Sum squared resid	2.67E+08	Schwarz criterion	17.36407
Log likelihood	-1292.284	Hannan-Quinn criter.	17.31640
F-statistic	16.37341	Durbin-Watson stat	1.290784
Prob(F-statistic)	0.000000		